



NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6
2.1. Rencana Pendapatan Daerah	6
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2. Pendapatan Transfer	8
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan	13
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	14
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	274
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	274
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	339
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	341
BAB VI PENUTUP	343

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	12
Tabel 3.1	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun	15
Tabel 3.2	Sinergitas Pemerintah Kota Madiun Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	17
Tabel 3.3	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Madiun dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	31
Tabel 3.4	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	46
Tabel 3.5	Prioritas Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	123
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	274
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan	340
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	341

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen PAD Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022	7
Gambar 2.2	Persentase Pertumbuhan PAD Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	7
Gambar 2.3	Komponen Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	8
Gambar 2.4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	9
Gambar 2.5	Komponen Pendapatan Transfer Pusat Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022	9
Gambar 2.6	Komponen Pendapatan Dana Perimbangan Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	10
Gambar 2.7	Komponen Pendapatan Transfer antar Daerah Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	10
Gambar 2.8	Komponen Lain-lain Pendapatan yang sah Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	11
Gambar 2.9	Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang sah Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan salah satu kewajiban Pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme perencanaan/penganggaran, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS dijabarkan sebagai dokumen yang menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah (PD) berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pagu anggaran ini dapat menjadi pagu definitif apabila peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disepakati oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Dalam ayat (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
- c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Penyusunan PPAS Kota Madiun tahun 2022 berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2022 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun. PPAS selanjutnya dijadikan sebagai bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang PPAS Kota Madiun Tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

PPAS Tahun Anggaran 2022 berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Kota Madiun, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang), program, kegiatan/sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. Dengan tersusunnya PPAS Tahun 2022 ini, diharapkan pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran tahun 2022 memiliki arah dan bingkai yang jelas dalam pelaksanaannya.

1.2. TUJUAN

PPAS Kota Madiun Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022;
- c. Sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing OPD yang dianggarkan melalui RAPBD Tahun Anggaran 2022;

1.3. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan PPAS Kota Madiun 2022 sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- u. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tahun 2022;
- w. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

- y. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
- z. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
- cc. Peraturan Waliikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2017-2020 dan proyeksi 2021-2022 menunjukkan adanya tren fluktuatif yang disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal, apalagi mulai tahun 2020 terjadi tekanan terhadap ekonomi akibat pandemic Covid -19. Komponen pendapatan yang bisa diintervensi oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah diharapkan memberikan kontribusi yang terus bertambah terhadap pendapatan daerah. Semua komponen PAD diharapkan terus tumbuh dalam memberikan kontribusi pendapatan, komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, di samping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

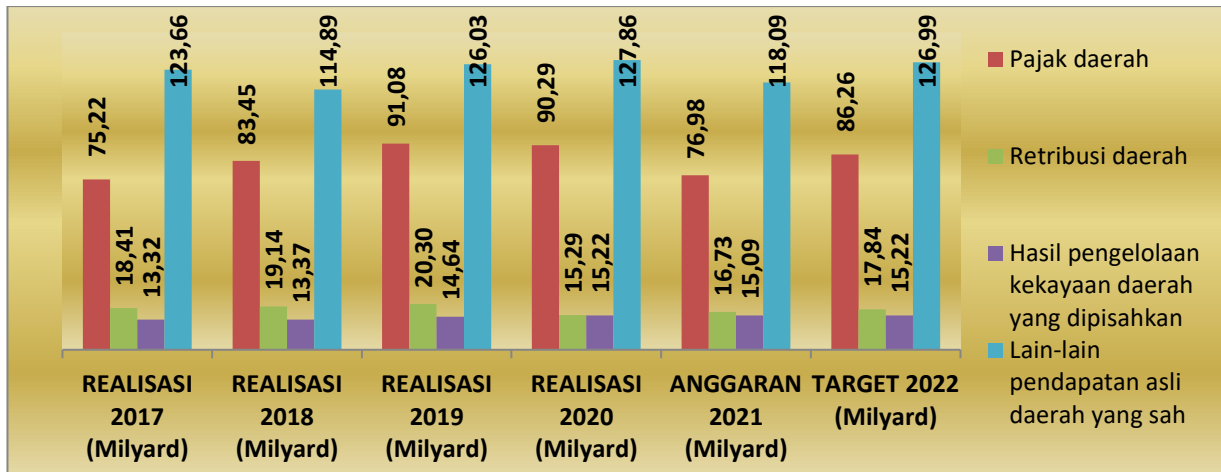
Dalam menentukan rencana pendapatan daerah, diupayakan untuk memperhatikan potensi yang ada dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya serta tahun berjalan. Dari hal tersebut, selanjutnya pengeluaran dapat dilakukan dalam bentuk belanja daerah serta pembiayaan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan daerah Kota Madiun tahun anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 0,12 % atau menjadi Rp 1.004.999.753.910,00 atau menalami kenaikan sebesar Rp. 1.177.610.817,00 dibandingkan anggaran Tahun 2021. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya kenaikan pendapatan lebih khusus untuk pendapatan asli daerah dan DBH-CHT sedangkan untuk pendapatan transfer selain DAU, DAK dan DBH-CHT tidak mengalami perubahan, untuk DAU mengalami penurunan sebesar Rp. 15.401859.000,00 atau berkurang 3,20% dari tahun 2021, karena secara nasional maupun global yang masih menghadapi wabah covid 19, yang tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian. Dana Alokasi Khusus juga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.410.515.000,00 atau turun sebesar 1,78%. Sedangkan untuk

DBH-CHT mengalami penambahan sebesar Rp. 2.577.342.000,00 atau naik sebesar 23,20%.

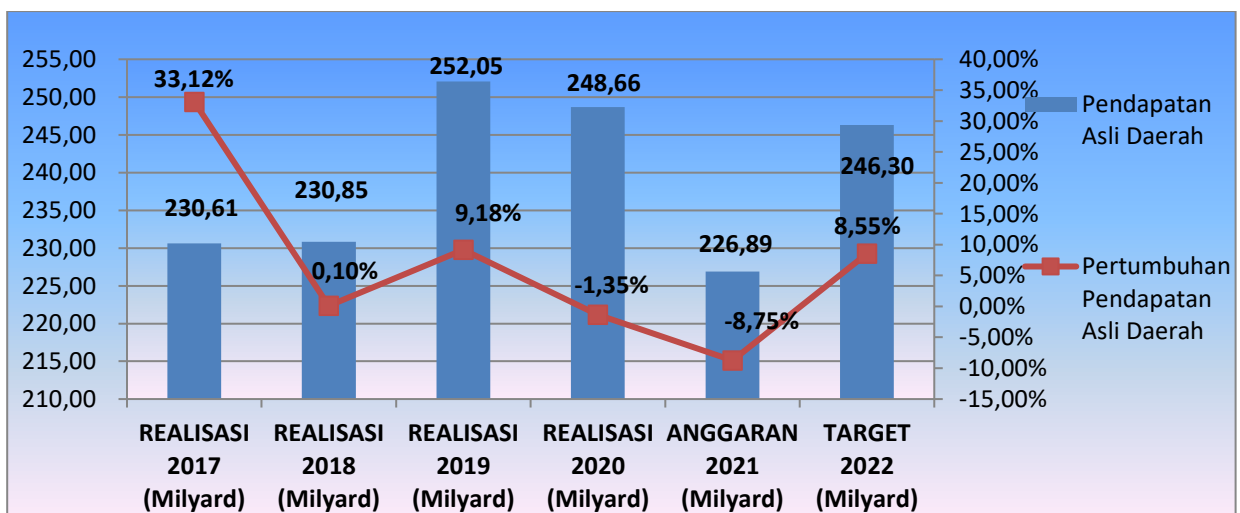
2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 8,55% atau bertambah sebesar Rp. 19.406.884.766,00 dari jumlah anggaran pada Tahun 2021 atau menjadi sebesar Rp. 246.298.823.859,00.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 1.
Komponen PAD Kota Madiun
Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 2. 2.
Persentase Pertumbuhan PAD Kota Madiun
Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

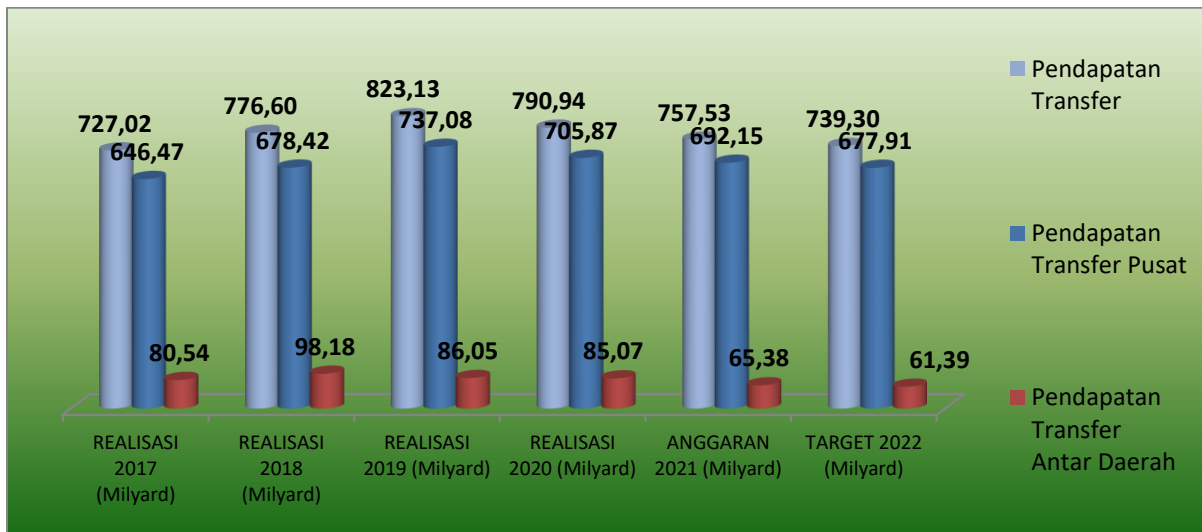
Komponen Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penyumbang terbesar dalam penentuan besarnya tingkat pendapatan asli daerah, yaitu mencapai Rp

126.985.607.490,00 atau 52,05 % dari nilai PAD untuk Lain-Lain PAD yang Sah dan Rp. 86.255.000.000,00 atau 33,93 % dari nilai PAD untuk Pajak Daerah.

2.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

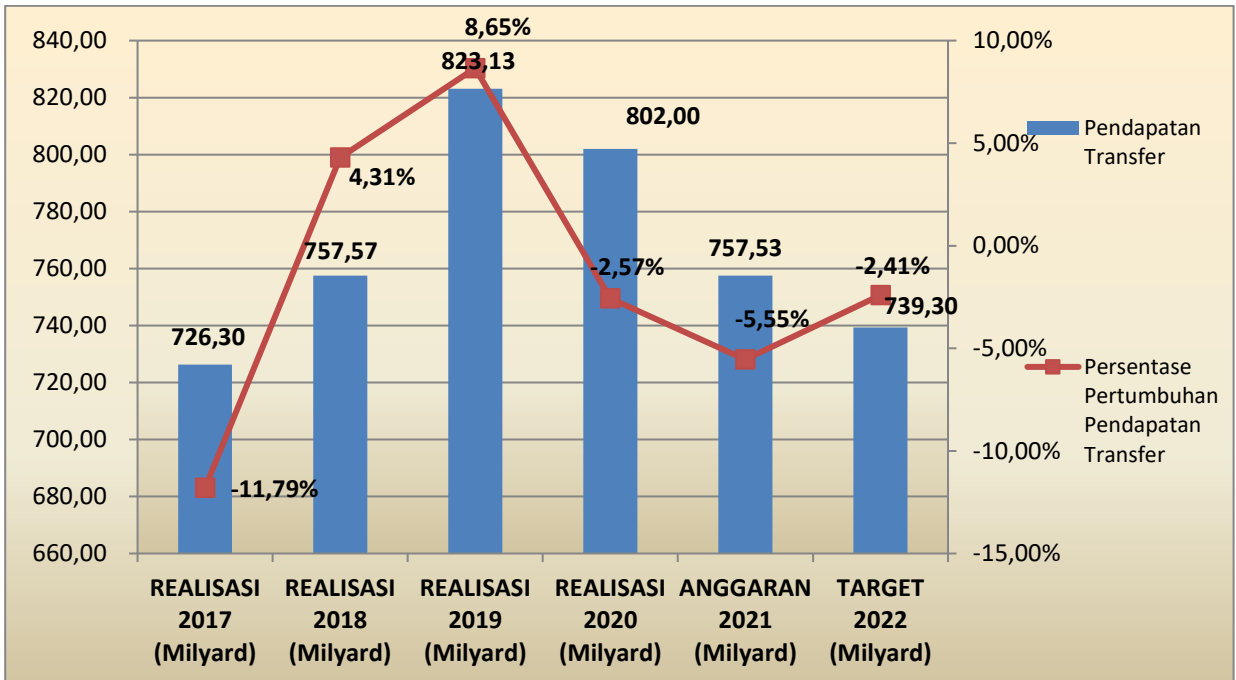
Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus) serta Pendapatan Transfer Antar Daerah (Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk tahun 2022 diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2021 (setelah refocusing dan memang informasi resmi belum ada). Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 (setelah refocusing dan memang informasi resmi belum ada, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021).

Pendapatan Transfer Kota Madiun pada tahun 2022 diproyeksikan Rp. 739.301.330.051,00. Kontribusi Dana Alokasi Umum masih mendominasi komponen Pendapatan Transfer dengan Dana Alokasi Umum yang diproyeksikan sebesar Rp. 465.495.171.000,00 (asumsi sama dengan DAU tahun 2021 setelah refocusing).



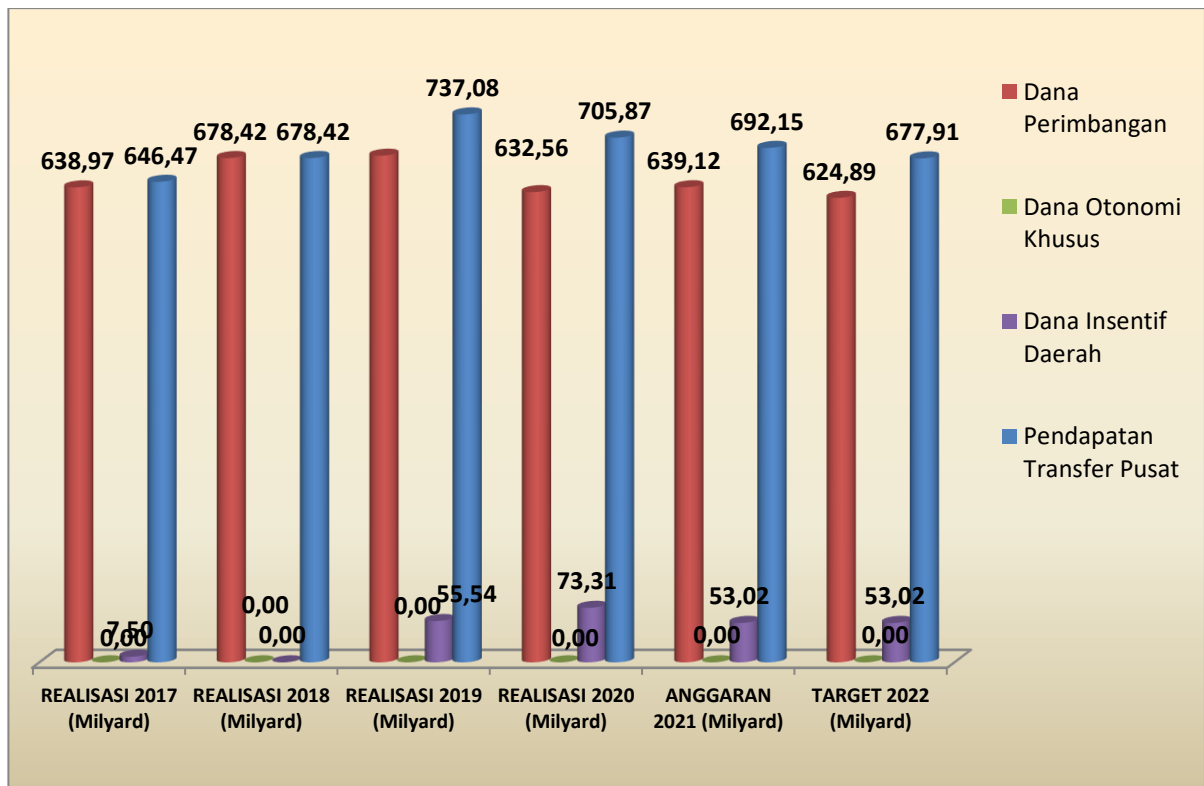
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 3.
Komponen Pendapatan Transfer
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022



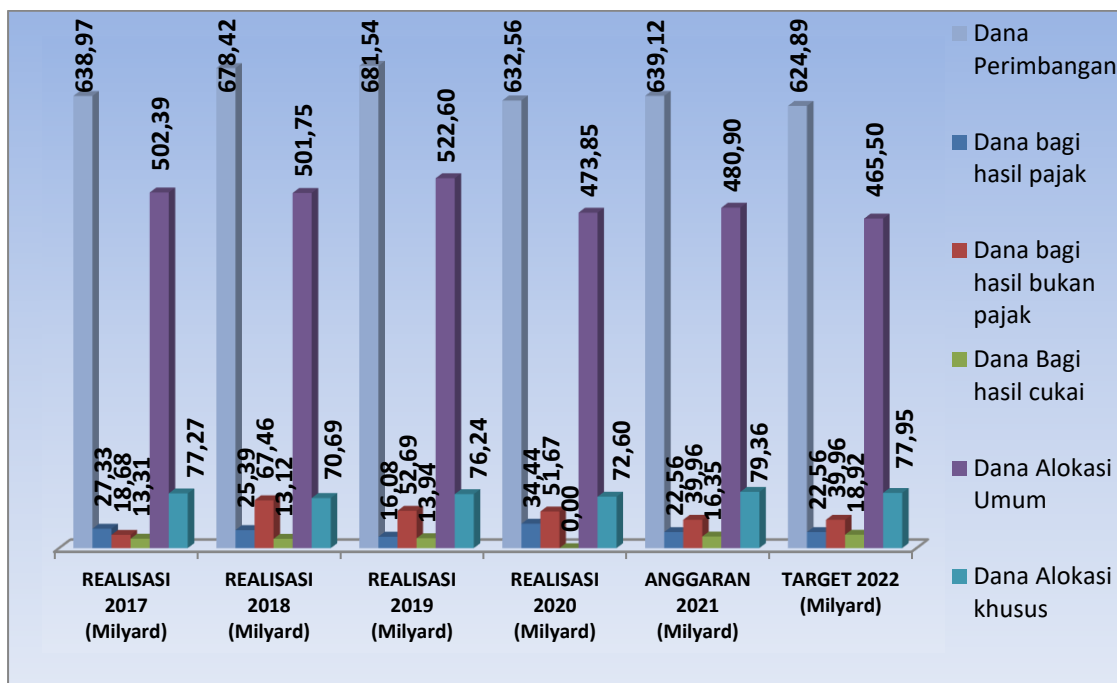
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 4.
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022



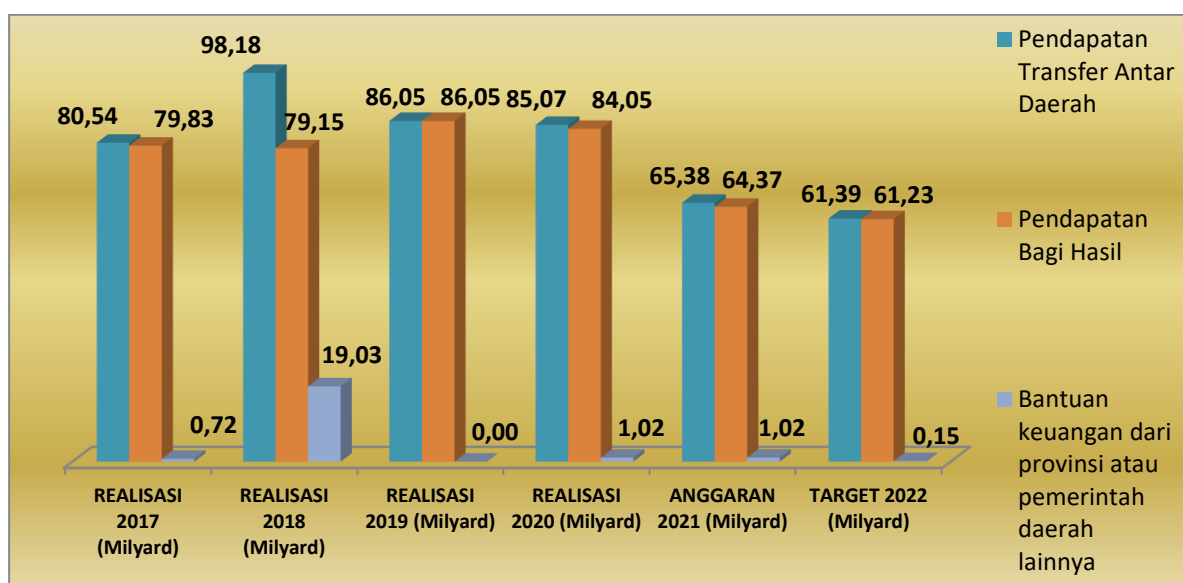
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 5.
Komponen Pendapatan Transfer Pusat
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 6.
Komponen Pendapatan Dana Perimbangan
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022



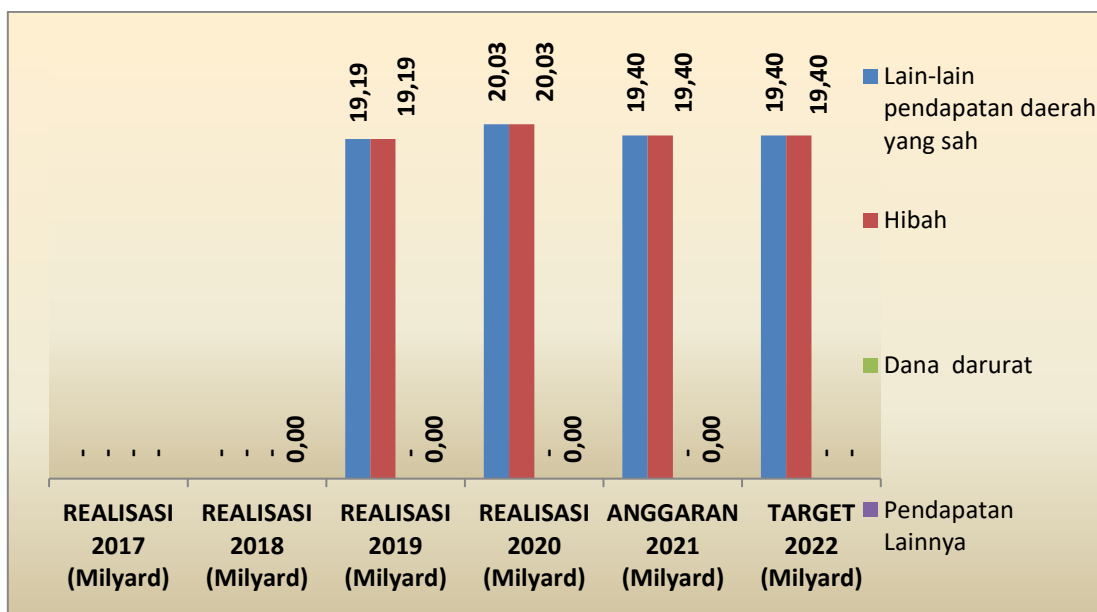
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 7.
Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah
Kota Madiun Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

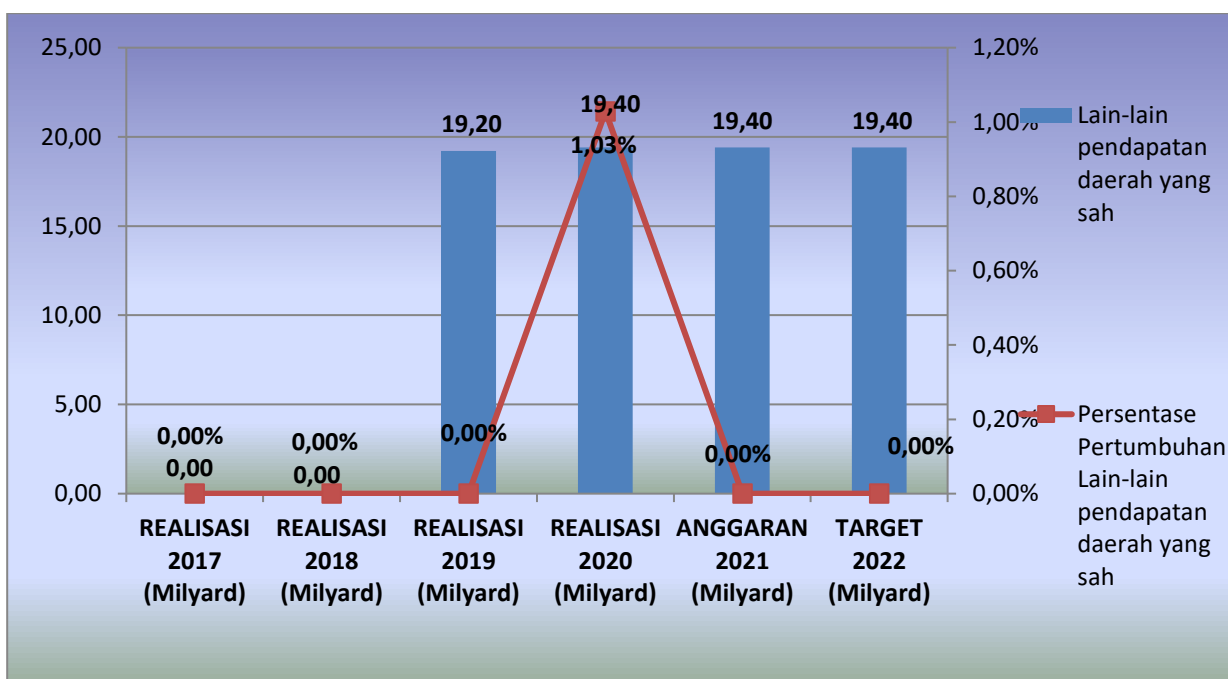
Komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Dana Darurat serta Pendapatan Lainnya. Pada tahun 2022 proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Madiun sebesar Rp. 19.399.600.000,00 (asumsi sama dengan tahun sebelumnya), dimana komponen utamanya dana hibah yaitu Bantuan Operasional

Sekolah (BOS). Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sama dengan tahun 2021.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 8
Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

Gambar 2. 9
Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2017 – 2021, dan Target Tahun 2022

Secara rinci, proyeksi Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH		% Naik/Turun
		ANGGARAN 2020	TARGET 2021	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.891.939.093,00	246.298.823.859,00	8,55%
1.1.1.	Pajak Daerah	76.978.000.000,00	86.255.000.000,00	12,05%
1.1.2.	Retribusi Daerah	16.731.224.667,00	17.841.947.807,00	6,64%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.092.455.426,00	15.216.268.562,00	0,82%
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	118.090.259.000,00	126.985.607.490,00	7,53%
1.2.	Pendapatan Transfer	757.530.604.000,00	739.301.330.051,00	-2,41%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	692.146.911.000,00	677.911.879.000,00	-2,06%
1.2.1.01	<i>Dana Perimbangan</i>	<i>639.122.048.000,00</i>	<i>624.887.016.000,00</i>	<i>-2,23%</i>
1.2.1.01.01.1	<i>Dana bagi hasil pajak</i>	22.563.617.000,00	22.563.617.000,00	0,00%
1.2.1.01.01.2	<i>Dana bagi hasil bukan pajak</i>	39.959.792.000,00	39.959.792.000,00	0,00%
1.2.1.01.01.3	<i>Dana Bagi hasil cukai</i>	16.345.513.000,00	18.922.855.000,00	23,20%
1.2.1.01.01.4	<i>Dana Alokasi Umum</i>	480.897.030.000,00	465.495.171.000,00	-3,20%
1.2.1.01.01.5	<i>Dana Alokasi khusus</i>	79.356.096.000,00	77.945.581.000,00	-1,78%
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	53.024.863.000,00	53.024.863.000,00	-23,19%
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.383.693.000,00	61.389.451.051,00	-6,11%
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.366.614.000,00	61.234.672.051,00	-4,87%
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.017.079.000,00	154.779.000,00	
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00%
1.3.1.	Hibah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00%
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0	
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.003.822.143.093,00	1.004.999.753.910,00	0,12%
2.	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA OPERASI	939.902.569.530,00	959.324.726.172,00	2,07%
2.1.1.	Belanja Pegawai	478.425.879.983,00	485.258.678.433,00	1,43%
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.059.231.547,00	436.594.527.461,00	2,71%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	13.765.706.000,00	13.572.686.278,00	-1,40%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.651.752.000,00	23.898.834.000,00	5,51%
2.2	BELANJA MODAL	197.738.448.365,00	165.395.287.479,00	-16,36%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
2.1.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.943.323,00	28.304.237.988,00	-43,95%
2.1.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.229.035.949,00	39.281.239.379,00	-30,14%
2.1.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.974.356.300,00	95.695.457.752,00	7,55%
2.1.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.034.112.793,00	2.114.352.360,00	3,94%

KODE	URAIAN	JUMLAH		% Naik/Turun
		ANGGARAN 2020	TARGET 2021	
2.1.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	65,97%
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	3.181.125.198,00	5.279.740.259,00	65,97%
2.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	
2.4.1.	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.140.822.143.093,00	1.129.999.753.910,00	-0,95%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-137.000.000.000,00	-125.000.000.000,00	-8,76%
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	137.000.000.000,00	125.000.000.000,00	-8,76%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.000.000.000,00	125.000.000.000,00	-8,76%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	137.000.000.000,00	125.000.000.000,00	-8,76%
	SILPA	0,00	0,00	

Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021, data diolah

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Kota Madiun tahun 2022 berasal dari SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya). Hal ini menyebabkan pada tahun 2021 target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 125.000.000.000,00 juga berasal dari SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya), dengan mempertimbangkan potensi riil dari pelampauan pendapatan dan realisasi belanja.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kota Madiun yang tertuang dalam RKPD 2022 pada intinya mempertimbangkan (1) visi Kota Madiun dalam RPJMD (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur; (3) isu-isu strategis daerah; dan (4) evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan sebagai akibat dampak pandemi covid 19, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 adalah ***"Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal"***.

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting dan juga perencanaan ke depan Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengembangan pariwisata serta pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, Penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan memuaskan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun pertama RPJMD Kota Madiun 2019-2024.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, prioritas nasional serta prioritas provinsi, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2022 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Penguatan Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
2. Prioritas 2 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan.
3. Prioritas 3 : Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Harmonisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Untuk Menciptakan Kondisi Masyarakat Yang Kondusif.
4. Prioritas 4 : Percepatan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya masing-masing Program di dalam prioritas pembangunan Daerah Kota Madiun disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Tabel 3.1
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 1: Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 3: peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4: Percepatan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.2.
Sinergitas Program Pemerintah Kota Madiun Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKULITAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan Energi	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi bersertifikat NIK	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase jenis izin yang diproses secara elektronik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengolahan Destinasi	Dinas BUPARPORA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Dinas BUPARPORA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan sektor Kepariwisataaan	Dinas BUPARPORA	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Menular (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Dinas Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang berstandar	Dinas Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan Barang penting	Dinas Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Dinas Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	-	-	-	-
3	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	Dinas PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Dinas PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Dinas PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	Dinas PENDIDIKAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	Dinas KESEHATAN dan KB	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penegelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	Dinas SOSIAL PP dan PA	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi	Dinas BUPARPORA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	
4	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas BUDPARPORA	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase status kelembagaan Orkesmas yang berbadan Hukum	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	BAKESBANGPOL	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA			
5	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase rawan banjir	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Dinas PUTR	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	Dinas PERKIM	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Dinas Kominfo	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	
6	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	BPBD	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas LH	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Dinas LH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Dinas LH	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Dinas LH	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas LH	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas LH	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Dinas LH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dinas LH	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
7	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	akurasi database kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BKAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	BKAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	BKAD	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BAPPENDA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	BAPPENDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BKPSDM	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	BKPSDM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	BKPSDM	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	INSPEKTORAT	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	INSPEKTORAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	

NO	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	

Tabel 3.3.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Madiun dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR SEKUNDER DAN PARIWISATA	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi bersertifikat NIK	Dinas TENAGA KERJA, KUKM	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase koperasi aktif dengan omzet meningkat	Dinas TENAGA KERJA, KUKM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro terfasilitasi yang beromzet naik	Dinas TENAGA KERJA, KUKM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PENANAMAN MODAL dan PTSP	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Dinas PENANAMAN MODAL dan PTSP	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	Dinas PENANAMAN MODAL dan PTSP	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan terselesaikan	Dinas PENANAMAN MODAL dan PTSP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Dinas PENANAMAN MODAL dan PTSP	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase jenis izin yang diproses secara elektronik	Dinas PENANAMAN MODAL dan PTSP	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengolahan Destinasi	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan sektor Kepariwisataaan	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PERDAGANGAN	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG	Jumlah pasar yang berstandar	Dinas PERDAGANGAN	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan Barang penting	Dinas PERDAGANGAN	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Dinas PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas PERDAGANGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Dinas TENAGA KERJA, KUKM	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	Dinas TENAGA KERJA, KUKM	
2	PENGUATAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DALAM UPAYA PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN SERTA LAYANAN INFRASTRUKTUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase rawan banjir	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RT/RW	Dinas PU dan PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	Dinas PERKIM	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PERHUBUNGAN	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Dinas PERHUBUNGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas KOMINFO	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi standart layanan informasi publik	Dinas KOMINFO	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas KOMINFO	
3	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING KETENAGAKERJAAN SERTA PENGENTASAN KEMISKINAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PENDIDIDIKAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	Dinas PENDIDIDIKAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	Dinas PENDIDIDIKAN	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Dinas PENDIDIDIKAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	wajib belajar 9 tahun	Dinas PENDIDIDIKAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas KESEHATAN dan KB	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Keluarga Sehat	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang mengalami kenaikan strata	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas TENAGA KERJA dan KUKM	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	Dinas TENAGA KERJA dan KUKM	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Dinas TENAGA KERJA dan KUKM	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus-kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas TENAGA KERJA dan KUKM	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	Dinas KESEHATAN dan KB	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diraih di bidang olahraga	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Dinas PENANAMAN MODAL dan PTSP	
4	PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL DAN PELESTARIAN NILAI_NILAI BUDAYA LOKAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	DINSOS PP dan PA	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penegelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak	DINSOS PP dan PA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang dibina	Dinas BUDPARPORA	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas BUDPARPORA	
5	PENINGKATAN KEMANDIRIAN PANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase angka kecukupan Energi	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Menular (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	Dinas HANPANG dan PERTANIAN	
6	PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	BPBD	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	Dinas PERKIM	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas LH	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Dinas LH	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Dinas LH	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Dinas LH	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (limbah B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Dinas LH	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		BERACUN (LIMBAH B3)			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas LH	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas LH	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Dinas LH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dinas LH	
7	PENINGKATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas DUKCAPIL	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dinas DUKCAPIL	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dinas DUKCAPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	akurasi database kependudukan	Dinas DUKCAPIL	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas KOMINFO	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas KOMINFO	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas PERPUSARDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sesuai Ketentuan	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BKAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	BKAD	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	BKAD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BAPPENDA	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak	BAPPENDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	BKPSDM	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	BKPSDM	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	BKPSDM	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	BAPPELITBANGDA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	INSPETORAT	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	INSPETORAT	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta asistensi yang Terpenuhi	INSPETORAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	MANGUHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	MANGUHARJO	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	TAMAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	TAMAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	KARTOHARJO	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	KARTOHARJO	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat daerah	BAKESBANGPOL	

NO	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase status kelembagaan Orkesmas yang berbadan Hukum	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	BAKESBANGPOL	
		PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Konflik horisontal di dalam masyarakat	BAKESBANGPOL	

Tabel 3.4.
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB	65 Skor	1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ideks RB	65 Skor	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Indeks RB	65 Skor					
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks RB	65 Skor	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Kota Madiun	
						1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks RB	65 Skor	1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks RB	65 Skor	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	7 Lembaga	Kota Madiun	
						1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	
							Jumlah Lembaga	1 Lembaga		
						1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	14 Bidang Kreatifitas	Kota Madiun	
						1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	73 Lembaga	Kota Madiun	
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	
							Jumlah Lembaga	1 Lembaga		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	2 Lembaga	Kota Madiun	
						1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	5.96 Siswa	Kota Madiun	
						1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	
						1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	25 Lembaga	Kota Madiun	

					1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	14 Bidang Kreatifitas	Kota Madiun	
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	25 Lembaga	Kota Madiun	
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	
		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD yang Terakreditasi	100 %	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	Kota Madiun	
					1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	1 Lembaga	Kota Madiun	
					1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD dan pendidikan kesetaraan SD SMP	1000 Orang	Kota Madiun	
					1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Prosentase lembaga paud yang berizin	30 %	Kota Madiun	
		1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Lembaga Non Formal yang Terakreditasi	100 %	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Lulus Ujian	175 siswa	Kota Madiun	
					1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang bersertifikat	60 %	Kota Madiun	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 Standart Pendidikan pada Kualitas Standart Proses dan Penilaian Pendidikan	100 %	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	Kota Madiun
						1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	Kota Madiun
						1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	Kota Madiun
		1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	Kota Madiun	

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	20 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Guru, Kasek dan Pengawas Berkompetensi	100 %	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru berprestasi	100 %	Kota Madiun	
						1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	100 %	Semua Kab/Kota	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Disusun	100 %	1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	11 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100 %		Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Kota Madiun	
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100 %	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota	

									Kota Madiun	
						1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	100 %	Semua Kab/Kota	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	2 unit	Semua Kab/Kota	
				Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	92.42 %					
						1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 unit	Semua Kab/Kota	
						1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	21 jenis	Semua Kab/Kota	
						1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 jenis	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan		11 jenis			
					Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan		2 kegiatan			
						1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi	24 jenis		
						1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jenis obat/vaksin yang diadakan	2 jenis	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin		1 paket			
						1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	Kota Madiun	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	100 %	Kota Madiun	
						1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	Kota Madiun	
						1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	Kota Madiun	

				1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	Semua Kab/Kota	
				1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	100 %		
				1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	7.9 %	Kota Madiun	
					Menurunnya Prevalensi stunting	9.5 %		
					Menurunnya Prevalensi stunting	10 %		
					Menurunnya Prevalensi stunting	11 %		
					Menurunnya Prevalensi stunting	11.5 %		
					Menurunnya Prevalensi stunting	12 %		
				1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	41 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	61 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100 %	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	62.5 %	Kota Madiun	
					Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	100 %		
				1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	87520 orang	Semua Kab/Kota	

						1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	52 %	Kota Madiun	
						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	89 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
							PKP Puskesmas	80 %		
							PKP Puskesmas	85 %		
							PKP Puskesmas	88 %		
							PKP Puskesmas	89.4 %		
							PKP Puskesmas	90 %		
						1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan operasional faskes	100 %	Kota Madiun	
						1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	100 %	Kota Madiun	
						1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya pelayanan gawat darurat	100 %	Kota Madiun	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	91 %	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Tambahan Tenaga Medis di Puskesmas Rawat Inap Standart	1 Dokter	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	1 dokter	Kota Madiun	
			1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Teregistrasi	91 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	91 %	Kota Madiun	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	86 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi sesuai Standar	86 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	86 %	Kota Madiun	

			1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat NoP-IRT	86 %	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRT yang sehat	86 %	Kota Madiun	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	100 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	6 jenis	Kota Madiun	
							Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	3 kegiatan		
			1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase SPM mencapai target	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
							Persentase SPM Puskesmas mencapai target	100 %		
			1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM aktif	42.86 %	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Puskesmas membina UKBM sesuai standar	62 %	Kota Madiun	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	60 kali	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Madiun	
						1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras yang terpenuhi	5 jenis	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Madiun	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	10 jenis	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang yang layak digunakan	100 %	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	59 buah	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 buah	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir	14 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah genangan	15 %	1.03.02.2.01.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	2 pintu air	Kota Madiun	
						1.03.02.2.01.28 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	1 stasiun	Kota Madiun	

						1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yg dinormalisasikan	1.5 km	Kota Madiun	
						1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				
						1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	100 persen	Kota Madiun	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelanggan yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	100 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Daerah Banjir	0	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	19.433 km	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	8 dokumen	Semua Kab/Kota	
						1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yg dibangun	1.5 km	Kota Madiun	
						1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				
						1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				
						1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi drainase yang dipelihara	3 kecamatan	Semua Kab/Kota	
						1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				
						1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				
						1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan				

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	5 pemohon	Kota Madiun	
						1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	5 gedung	Kota Madiun	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	100 %	1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	30 lokasi	Kota Madiun	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	95 %	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	10 dokumen	Kota Madiun	
						1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	5 hektar	Semua Kab/Kota	
						1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen	2 dokumen	Kota Madiun	
						1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yg dibangun	1000 meter	Semua Kab/Kota	
						1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas yang dilebarkan	6 ruas	Kota Madiun	
						1.03.10.2.01.07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah ruas yang ditambah lajurnya	1 ruas	Semua Kab/Kota	
						1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan				
						1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	6 km	Kota Madiun	
						1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	28 ruas	Semua Kab/Kota	
						1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	1 jembatan	Kota Madiun	
						1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan				
						1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	10 jembatan	Kota Madiun	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang	95 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	200 orang	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta	200 orang	Semua Kab/Kota	

JASA KONSTRUKSI	Memenuhi Standart Kompetensi									
			1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah rekomendasi IUJK	200 orang	1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	50 BUJK	Kota Madiun	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang di tetapkan	1 dokumen	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	Kota Madiun	
						1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 dokumen	Kota Madiun	
						1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah di bidang penataan ruang	3 kali	Semua Kab/Kota	
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan ruang	1 dokumen	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100 %	Semua Kab/Kota	
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	1 dokumen	1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	100 %	Kota Madiun	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 %	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

					1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	1.04.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					1.04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	1 dokumen	1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	1 dokumen	Semua Kab/Kota

			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 lokasi	1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	1 lokasi	Semua Kab/Kota	
			1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	100 %	1.04.02.2.05.01 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase fasilitas pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	100 %		
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	99 %	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	3 dokumen	Semua Kab/Kota	
						1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	100 %	Semua Kab/Kota	
						1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	3 lokasi	Semua Kab/Kota	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100 %	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi prasarana,sarana dan utilitas umum yang disediakan	3 lokasi	Semua Kab/Kota	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

KABUPATEN/KOTA A	Nilai SAKIP	A Skor		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100 %		
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	100 %	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	100 %		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100 %	1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pementahan daerah	100 %		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %		
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %		Persentase Pemenuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Representatif	100 %		
		1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	100 %					
					1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	100 %		
					1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %		
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	97 %	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	100 %	Kota Madiun
					1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	97 %	Kota Madiun	
					1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	90 %	Kota Madiun	

					1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	92 %	Kota Madiun	
					1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Berkompeten	80 %	Kota Madiun	
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %	Kota Madiun
					1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	100 %	Kota Madiun	
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Berkompeten	100 %	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase PPNS Yang Berkompeten	100 %	Kota Madiun
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	100 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100 %	Semua Kab/Kota
					1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100 %	Semua Kab/Kota	
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	100 %	Semua Kab/Kota
					1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	100 %	Semua Kab/Kota	
					1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100 %	Semua Kab/Kota	
					1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	100 %	Semua Kab/Kota	
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	100 %	Semua Kab/Kota

1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	80 %	Kota Madiun	
						1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kota Madiun	
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Didata	100 %	Kota Madiun	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	12 doku men	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 doku men	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 persen	1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase peserta yang paham	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen	1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 persen	Kota Madiun	

						1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang dibina	91 persen	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	135 orang	Kota Madiun	
						1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	80 orang	Kota Madiun	
						1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	1 lembaga	Kota Madiun	
						1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	5 Lembaga	Kota Madiun	
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tertangani	100 persen	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	160 orang	Kota Madiun	

					1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	50 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan alat bantu	10 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	15 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	60 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	286 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	40 orang	Kota Madiun	
		1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani	100 persen	1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	15 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	150 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	105 orang	Kota Madiun	

					1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	7 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan	20 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	132 orang	Kota Madiun	
					1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang	Kota Madiun	
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90 persen	1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	24 orang	Kota Madiun
						1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	24 orang	Kota Madiun
						1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	24 orang	Kota Madiun
			1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang di data	14042 orang	Kota Madiun
						1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verwal DTKS	27 kelurahan	Kota Madiun
						1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	3900 KK	Kota Madiun
						1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	10 KUBE	Kota Madiun
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana yang mendapat bantuan	100 persen	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	3300 orang	Kota Madiun

	Korban Bencana									
						1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	1000 orang	Kota Madiun	
						1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial	300 orang	Kota Madiun	
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase kelurahan yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	100 persen	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	60 orang	Kota Madiun	
						1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	26 orang	Kota Madiun	
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	1 paket	Kota Madiun	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	2.07.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan cukai	100 orang	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Kota Madiun	
						2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	100 %	Semua Kab/Kota	

									Kota Madiun	
					2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	23 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	tersedianya peserta pelatihan yang berkompeten	220 orang	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	220 orang	Kota Madiun	
			2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPTKS yang terakreditasi	20 %	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	4 pembinaan	Kota Madiun	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	79 %	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	225 orang	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersediannya aplikasidan data ketenagakerjaan yang aktual	1 aplikasi dan dokumen	Kota Madiun	
						2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	175 orang	Kota Madiun	
						2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	50 orang	Kota Madiun	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus - Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	10 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	25 %	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	15 dokumen	Semua Kab/Kota	
						2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	200 perusahaan	Kota Madiun	

			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	15 Kasus Terselesaikan	Kota Madiun	
						2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan SIAGAKITA	4000 orang	Kota Madiun	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase program yang di ARG	10 persen	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen program yang di ARG	34 dokumen	Kota Madiun	
						2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor PUG	375 orang	Kota Madiun	
						2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	70 orang	Kota Madiun	
						2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	75 orang	Kota Madiun	
			2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi perempuan pada lembaga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	12.5 persen	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	180 orang	Kota Madiun	
						2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	116 orang	Kota Madiun	
			2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	50 persen	2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	15 lembaga	Kota Madiun	
						2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	80 orang	Kota Madiun	
						2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	32 lembaga	Kota Madiun	

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	67.39 persen	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	50 orang	Kota Madiun	
						2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	Kota Madiun	
			2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	56 persen	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	40 orang	Kota Madiun	
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 persen	2.08.03.2.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	20 klien	Kota Madiun	
						2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	30 orang	Kota Madiun	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peserta yang memahami kesetaraan gender dan hak anak	80 persen	2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	111 oran g	Kota Madiun	
						2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	108 RT	Kota Madiun	
						2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	81 orang	Kota Madiun	
			2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang aktif dalam peningkatan kualitas keluarga dan hak anak	100 persen	2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	100 oran g	Kota Madiun	
						2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	14 lemb ga	Kota Madiun	
						2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	102 oran g	Kota Madiun	

			2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan hak anak	100 persen	2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	81 orang	Kota Madiun	
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	65 orang	Kota Madiun	
						2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	65 orang	Kota Madiun	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12.5 %	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	12.55 persen	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	100 orang	Kota Madiun	
			2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	12.55 persen	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	105 orang	Kota Madiun	
						2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	67 orang	Kota Madiun	
						2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	Kota Madiun	
						2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	90 orang	Kota Madiun	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sekolah yang terlibat dalam perlindungan anak	40.74 persen	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	30 sekolah	Kota Madiun	
			2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	48 persen	2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	10 orang	Kota Madiun	
						2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	40 orang	Kota Madiun	

			2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak	100 persen	2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	60 orang	Kota Madiun	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	20 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	2.09.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	100 %	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen (NBM, Prognosa Kebutuhan, Neraca Pangan Strategis)	3 Dokum en	Kota Madiun	
						2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tertanganinya Kerawanan Pangan	27 Kelom pok	Kota Madiun	
						2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir, tingkat eceran, tingkat produsen, rekapitulasi)	4 Dokum en	Kota Madiun	
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	2100 kkal/kapit a	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	2 Dokum en	Kota Madiun	
						2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	2 kali	Kota Madiun	
						2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun	1 kali	Kota Madiun	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 kali	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	200 Oran g	Kota Madiun	
						2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	45 Samp el	Kota Madiun	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %	2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	100 %	2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah sesuai ketentuan	100 %	Semua Kab/Kota	
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	100 %	2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa, konflik perkara pertanahan yang tertangani	100 %	Semua Kab/Kota	

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Penatagunaan Tanah	100 %	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100 %	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	100 %	Semua Kab/Kota	
						2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data yang dapat disajikan	1 dokum en	Semua Kab/Kota	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2.11.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 dokum en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 persen	2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	presentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya (perhitungan = realisasi/target kebutuhan)	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	presentase peningkatan kapasitas pegawai	100 pers en	Kota Madiun	
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (perhitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 pers en	Kota Madiun	
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 persen	2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase pemenuhan gaji non ASN perangkat daerah	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	presentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan	100 persen	Kota Madiun	
						2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	71.79 %	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1 dokumen	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	Kota Madiun	
			2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi kajian LH fyang tersedia	1 dokumen	2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	Kota Madiun	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan/Usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	20 kali	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	15 kali	Kota Madiun	
						2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	3 kegiatan	Kota Madiun	
			2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	15 usaha/kegiatan	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	10 kali	Kota Madiun	
						2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan	2 kegiatan	Kota Madiun	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	94.32 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI lokal daerah	332 jenis	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen yang di susun	1 dokumen	Kota Madiun	

2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun(limbah B3)	71,5 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Memenuhi Syarat	16 lokasi	2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	5 kegiatan/ usaha	Kota Madiun	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taah terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.7 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 perusahaan	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	3 perusa haan	Kota Madiun	
						2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	15 wajib usaha	Kota Madiun	
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	4 kegiatan n	Kota Madiun	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	5 kasus	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10 kasus	Kota Madiun	
						2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	50 kader	Kota Madiun	

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang di kelola	43777 ton	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	2 lokasi	Kota Madiun	
						2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah volume sampah yang masuk TPA	32280 to n	Kota Madiun	
						2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	3 jenis	Kota Madiun	
			2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	35 kelompok	2.11.11.2.03.02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	3 kecam atan	Kota Madiun	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemuhan dokumen perencanaan, pengendalian evaluasi perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	100 %	Semua Kab/Kota	
						2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemuhan dokumen administrasi umum	100 %	2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Kota Madiun	
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota	

								Kota Madiun		
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100 %	2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	17000 %	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekamana KTP EL	2500 data	Kota Madiun	
						2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	1000 dokumen	Kota Madiun	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	1600 dokumen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	1500 dokumen	Kota Madiun	
						2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	100 dokumen	Kota Madiun	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77 %	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	13 laporan	Kota Madiun	
						2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	10 dokumen	Kota Madiun	

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase Sekolah SSK yang membuat PRP Kependudukan	100 %	2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	5 sekolah		
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Keluarga	100 %	2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kelurahan yang telah mendata semua keluarga dalam Pendataan Keluarga	27 kelura han	Kota Madiun	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmeet Need	< 7.9 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	4 Jenis	Kota Madiun	
						2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangsa Kencana (BKB, BKR, PIK R, UPPKS, BKL, IMP, PKB, PUS)	8 kelompok	Kota Madiun	
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Kader yang Melakukan Updating Data	100 %	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	148 Kade r	Kota Madiun	
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka Drop Out (Kurang Dari)	19.5 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	22 Faskes	Kota Madiun	
						2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	651 asep tor	Kota Madiun	
						2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	2 paket	Semua Kab/Kota	
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang Menerima Pembinaan Kesertaan ber KB	100 %	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	3 kegiata n	Kota Madiun	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	71 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Angka Kepesertaan Sasaran dalam Kegiatan BKB	61 %	2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 kegiata n	Kota Madiun	
						2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-	3 kegiata n	Kota Madiun	

							R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

					2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	Kota Madiun	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	88 %	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya kebijakan	100 %	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi	100 %	Kota Madiun
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik	75 %	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	100 %	Kota Madiun
						2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	persentase perlengkapan jalan yang dipelihara	100 %	Kota Madiun
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	100 %	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	persentase fasilitas terminal yang layak	100 %	Kota Madiun
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	100 %	2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengurusan ijin	100 %	Kota Madiun
						2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase movev penyelenggaraan parkir	100 %	Kota Madiun
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Lulus Uji	100 %	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	Kota Madiun
						2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemohon yang paham	100 %	Kota Madiun
						2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	100 %	Kota Madiun
						2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase laporan	100 %	Kota Madiun
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 %	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen MRLL	6 kegiatan	Kota Madiun
						2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	100 %	Kota Madiun
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengurusan rekomendasi Andalalin	100 %	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase pemenuhan rekomendasi	100 %	Kota Madiun

			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan keselamatan	100 %	2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peserta	100 %	Kota Madiun	
						2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	persentase Jumlah kegiatan	100 %	Kota Madiun	
						2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	persentase Jumlah kegiatan	100 %	Kota Madiun	
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	100 %	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan yang melayani	41 kend	Kota Madiun	
						2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan barang	23000 kend	Kota Madiun	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

					2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 berita	Kota Madiun
						2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	5 media	Kota Madiun
						2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100 %	Kota Madiun
						2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kelompok	Kota Madiun
						2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan	1 Paket	Kota Madiun
						2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	6 Tema informasi	Kota Madiun
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	238 domain	Kota Madiun
						2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1750 titik	Kota Madiun
			2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	100 %	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 paket	Kota Madiun
						2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	180 titik	Kota Madiun
						2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	7 Aplikasi	Kota Madiun

						2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	1 paket	Kota Madiun	
						2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	100 %	Kota Madiun	
						2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK	4 Komunitas	Kota Madiun	
						2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	1 unit	Kota Madiun	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi Bersertifikat NIK	86.5 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi bersertifikat NIK	135 Koperasi	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang dibina	156 koperasi	Kota Madiun	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi Aktif Dengan Omzet Meningkat	30 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang meningkat omsetnya	50 Koperasi	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina	156 koperasi	Kota Madiun	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Terfasilitasi yang Beromset Naik	7 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Mikro terfasilitasi beromset naik	4 orang	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	50 orang	Kota Madiun	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/ perlengkapan kantor	100 persen	Kota Madiun	
						2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 persen	2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 persen	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	100 %	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 paket	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	1 dokumen	Kota Madiun	
						2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	1 paket	Kota Madiun	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	26 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	20 investor	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5 kegiatan	Kota Madiun	
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	85 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pemohon izin	1600 izin	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	80 orang	Kota Madiun	
						2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	persentase pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	15 persen	Kota Madiun	
						2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	55 kali	Kota Madiun	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	110 Perusahaan	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dibina	110 perusahaan	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	30 perusahaan	Kota Madiun	

						2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	50 perusahaan	Kota Madiun	
						2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman modal	30 perusahaan	Kota Madiun	
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Jenis Izin yang Diproses Secara Elektronik	100 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik	70 jenis izin	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	35 izin	Kota Madiun	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda	12 orang	2.19.02.2.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	1 event	2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40 orang	Kota Madiun	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	35 medali	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras olahraga yang terfasilitasi	3 sarpras olahraga	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 sarpras olahraga	Kota Madiun	
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan	2 event	2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	1 event	Kota Madiun	
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 cabang	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 cabang olahraga	Kota Madiun	
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	1 festival	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	1 festival olahraga	Kota Madiun	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan	100 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	1 dokumen	Kota Madiun	

	Pembangunan Daerah									
						2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Kegiatan	1 paket	Kota Madiun	
						2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata	1 dokumen	Kota Madiun	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik (TTE)	7 OPD	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	7 OPD	Kota Madiun	
						2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita sandi yang diamankan	900 berita	Kota Madiun	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.22.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupi pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	2.22.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.22.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2.22.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	6 %	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	8 budaya	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Obyek Pemajuan Budaya yang dimanfaatkan	8 budaya	Kota Madiun	
						2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	1 festival	Kota Madiun	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina	100 Orang	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	2 pelatihan	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	20 orang	Kota Madiun	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	21 %	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 unit	2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	20 unit	Kota Madiun	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.3 %	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	72 Perpustakaan	Semua Kab/Kota	
						2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	3500 eks emplar	Semua Kab/Kota	
						2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	4100 eks emplar	Semua Kab/Kota	
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaryakatan Gemar Membaca	20 kali	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2500 orang	Semua Kab/Kota	

2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	36 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	168 eksemplar	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	4 kegiatan	Semua Kab/Kota	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	42 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	28 %	2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	912 meter linier	Semua Kab/Kota	
			2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	250 nomor arsip	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	250 berkas	Semua Kab/Kota	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8.4 Nilai	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	0.01 %	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip in aktif yang dinilai	917 nomor berkas	Semua Kab/Kota	

						2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	1 kali	Semua Kab/Kota	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	280 Ton	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	245 orang	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	2 unit/tahun	Kota Madiun	
						3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana yang tersedia	4 paket	Kota Madiun	
						3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring Pembudidaya Ikan	3 Dokumen	Kota Madiun	
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	89 Ton	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 orang	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Monitoring Perikanan Tangkap	2 Dokumen	Kota Madiun	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	15.7 Kg /Kapita /Tahun	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring Pengolah dan Pemasar Ikan	3 Dokumen	Kota Madiun	

			3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	24 ton	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	10 UMK M	Kota Madiun	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	2 destinasi	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 lokasi	Kota Madiun	
						3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yg memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2 lokasi	Kota Madiun	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri	4 Event	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	2 promosi	3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	2 promosi	Kota Madiun	
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataan	19 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor pariwisata	18 %	3.26.05.2.01.06 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	1 event	Kota Madiun	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	55 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	75 %	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	39 lokasi	Kota Madiun	
						3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	2 Paket	Kota Madiun	
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi	12 lokasi	Kota Madiun	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	50 %	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	50 %	3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan laporan/peta/peraturan daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B kota Madiun	1 Dokumen	Kota Madiun	

PRASARANA PERTANIAN										
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/dipelihara	25 %	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah JIUT dibangun/direhab/dipelihara	1 Unit	Kota Madiun	
						3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT dibangun/direhab/dipelihara	1 Unit	Kota Madiun	
						3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	1 Unit	Kota Madiun	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	2850 Ekor	Semua Kab/Kota	
			3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	200 sampel	Kota Madiun	
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian	72 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	1750 ha/thn	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	10 ha	Kota Madiun	
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Memiliki Izin Usaha Pertanian	10 %	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 jenis	3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Petani yang produksinya lolos uji layak mutu	4 Orang	Kota Madiun	
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	20 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	78 orang	3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	1 paket	Kota Madiun	
						3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	1 Jenis	Kota Madiun	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										

3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	6 dokum en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	3.30.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Persentase tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 %					
			3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Persentasi Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak guna	100 %					
						3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						3.30.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Perusahaan yang Memperbarui Perijinan	100 %	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase ijin yang diterbitkan	100 %	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	75 surat	Kota Madiun	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	100 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 pasar	Kota Madiun	
						3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 pasar	Kota Madiun	
			3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Peningkatan omset Pasar Rakyat	3200000000 Ru piah	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pasar	2 kali	Kota Madiun	
						3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	118 oran g	Kota Madiun	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	3 kali	Kota Madiun	
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100 %	3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan	2 kali	Kota Madiun	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	100 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang	7000 utt p	Kota Madiun	
						3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	9 lokasi	Kota Madiun	
3.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Perdagangan yang Dipromosikan	15 Pro duk	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 kali	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	4 kali	Kota Madiun	

						3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem Informasi baik baru dan pemeliharannya	2 jenis	Kota Madiun	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	100 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perindustrian	2 dokumen	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi	20 IKM	Kota Madiun	
						3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	40 IKM	Kota Madiun	
						3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	65 IKM	Kota Madiun	
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	12,80 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM	4 kegiatan	3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	4 kali publikasi	Kota Madiun	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Penduduk yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	20 %	3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi penataan persebaran	100 orang	3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	21 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)		6 Dokumen
					Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah		100 persen	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja		6 dokumen

			evaluasi perangkat daerah							
			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %		
			Prosentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %			Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen		
		4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %			Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen		
			Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %			Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %		
			Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %						
		4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	82.75 Indeks	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Semua Kab/Kota	
			persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen						
			Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %						
			Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %						
					4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	Semua Kab/Kota	

						Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Kota Madiun				
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 %					
						Prosentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 %					
		4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun				
			Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %			Persentase pemenuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		100 %			
			Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 persen								
			Prosentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik daerah urusan Pemerintah Daerah	100 %								
					4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun				
							Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan		100 persen			
							Persentase pemenuhan peralatan dan mesin lainnya		100 %			
							Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin		100 %			
					4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun				
							Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		100 %			

					Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %		
		4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun
			Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %		persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen	
			Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen		Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	
			Prosentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintah Daerah	100 %		Prosentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	100 %	
		4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun
			Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %		Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	
			Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %		Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	100 %	
			Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen		Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100 %	
			Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %		Prosentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	
				4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota	

						persentase gedung kantor yang layak digunakandigunakan	100 persen	Kota Madiun	
						persentase gedung yang layak digunakan	100 %		
						Persentase gedung yang layak digunakan	100 %		
						Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %		
					4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %		
						persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 persen		
						Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Representatif	100 %		
						prosentase sarana/prasarana gedung yang representatif	100 %		
		4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Kota Madiun	
					4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Kota Madiun	
		4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	100 %	Kota Madiun	
					4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	100 %	Kota Madiun	
					4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	100 %	Kota Madiun	
		4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.2 Indeks	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	Kota Madiun	
					4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2.85 Indeks	Kota Madiun	

					4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kecukupan dokumen kinerja yang disusun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	Kota Madiun	
		4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	500 kali	Kota Madiun	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	10 kali	Kota Madiun
					4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen rupa bumi	2 dokumen	Kota Madiun	
					4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	5 dokumen	Kota Madiun	
		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	15 kegiatan	Kota Madiun	
		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang tersusun	100 persen	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	20 Perda/Raperda	Semua Kab/Kota	
					4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	3 kegiatan	Semua Kab/Kota	
					4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	3 jenis	Semua Kab/Kota	
		4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	100 %	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	5 kali	Kota Madiun	
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	3 kegiatan	Kota Madiun	

					4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	2 kegiatan	Kota Madiun	
		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	100 %	4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	Kota Madiun	
					4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	12 dokumen	Kota Madiun	
		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	100 %	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tender/seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	100 %	Kota Madiun	
					4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase tender/seleksi yang terumumkan di sistem LPSE	100 %	Kota Madiun	
		4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100 %	Kota Madiun	
4.02 SEKRETARIAT DPRD									
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun
			4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun
			4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun

					4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional ASN	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan/Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100 %	Kota Madiun	
					4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	12 Bulan	Kota Madiun	
					4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	5 Jenis	Kota Madiun	
					4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	1 kali/orang	Kota Madiun	
		4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	4 Dokumen	Kota Madiun	
					4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional DPRD	100 %	Kota Madiun	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas	80 Skor	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	100 %	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	15 raperda	Kota Madiun

	Tugas dan Fungsi DPRD									
					4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	3 dokumen	Kota Madiun		
		4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Pembahasan KUA-PPAS, KUPA-PPASP dan APBD , PAPBD sesuai jadwal/tepat waktu	4 Dokumen	Kota Madiun		
		4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100 %	4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rekomendasi DPRD atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	1 Dokumen	Kota Madiun		
					4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	2 Dokumen	Kota Madiun		
		4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD	jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	6 bimtek	Kota Madiun		
					4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	50 Kegiatan	Kota Madiun		
					4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	2 Dokumen	Kota Madiun		
		4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang masuk RKPd	100 %	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap	90 Dokumen	Kota Madiun		
5.01 PERENCANAAN										
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun		
					5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun		
					5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun		
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun		

				5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatan kapasitas pegawai	100 %	Kota Madiun	
				5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang memahami	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas jabatan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	1 kali	Kota Madiun	
				5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	1 kali	Kota Madiun	

				5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	1 kali	Kota Madiun	
				5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	1 dokumen	Kota Madiun	
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	4 dokumen	Kota Madiun	
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan	100 %	Kota Madiun	
				5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen	14 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia	100 %	Kota Madiun	
				5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen	1 dokumen	Kota Madiun	
		5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	1 dokumen	Kota Madiun	
		5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	1 dokumen	Kota Madiun	

5.02 KEUANGAN										
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	20 dokumen	5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat daerah	100 %		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	20 doku men		
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		Prosentase Pemenuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100 Pers en		
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100 %	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Presentase peserta yang paham	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Prosentase terlaksananya adminsitrasi umum perangkat daerah	100 %		Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 pers en		
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD urusan pemerintahan daerah	100 %	5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Prosentase pemenuhan barang milik daerah	100 %					
						5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	100 pers en	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Prosentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %		Prosentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Jumlah kendaraan Dinas perorangan/jabatan digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
				Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %		Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 persen		
						5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
							Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100 persen		
						5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
							Prosentase peralatan gedungkantor yang layak digunakan	100 persen		
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Madiun	
						5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen	2 dokumenDokumen	Kota Madiun	
						5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	34 Dokumen	Kota Madiun	
						5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	34 Dokumen	Kota Madiun	
						5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	Kota Madiun	
						5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	Kota Madiun	

					5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	Kota Madiun	
		5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi kasda	55 Dokumen	Kota Madiun	
					5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Pengeluaran kas	3 Dokumen	Kota Madiun	
		5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	100 %	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Produk Hukum	2 Dokumen	Kota Madiun	
					5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan keuangan	2 buku	Kota Madiun	
					5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	Kota Madiun	
					5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pendampingan OPD	500 orang	Kota Madiun	
		5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Bantuan Tidak Terduga	100 %	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Pengajuan BTT	100 %	Kota Madiun	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	7 dokumen	5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD	5 Dokumen	Kota Madiun
				Jumlah Dokumen BMD yang dipelihara	5 Dokumen				
					5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah				Kota Madiun
					5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	18 Dokumen		Kota Madiun
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	100 %	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan , pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Kota Madiun
					5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Menerima Reword dan Wajib Pajak Yang Menerima Sosialisasi	450 Wajib Pajak		Kota Madiun
					5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokummen pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	125 obyek Pajak		Kota Madiun
					5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Modul Aplikasi Yang di Kembangkan	2 aplikasi		Kota Madiun
					5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Laporan Penilaian NJOP	2 Laporan		Kota Madiun

						5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penetapan	10 %	Kota Madiun	
						5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Terlayani	2500 WP	Kota Madiun	
						5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya laporan pajak daerah tepat waktu	100 %	Kota Madiun	
						5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Tercapainya pelaksanaan penagihan pajak daerah	100 %	Kota Madiun	
						5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Wajib Pajak yang pembayarannya sesuai dengan potensi	100 %	Kota Madiun	
5.03 KEPEGAWAIAN										
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	45 ASN	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi koordinasi dan konsultasi	100 persen	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	80 kali	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Jasa Peralatan Kantor	18 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	19 kendaraan	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	2 Gedung	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarpras	8 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	100 100	5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi ASN	250 formasi	Kota Madiun	
						5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah realisasi pemberhentian ASN	212 ASN	Semua Kab/Kota	
						5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Update data kepegawaian	3000 dokumen	Semua Kab/Kota	
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 persen	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pegawai Ditempatkan	209 ASN	Semua Kab/Kota	
						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK	475 dokumen	Semua Kab/Kota	
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan kompetensi ASN	100 persen	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta	280 Peserta	Semua Kab/Kota	
						5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Peserta	40 Peserta	Semua Kab/Kota	
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase pelanggaran disiplin pegawai	0.3 persen	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pegawai Dibina	515 pegawai	Semua Kab/Kota	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	12 %	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100 persen	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	226 Peserta	Semua Kab/Kota	
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	85 persen	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta	240 Peserta	Semua Kab/Kota	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah dokumen penelitian/kajian	2 dokumen	Kota Madiun	
						5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen data kelitbangan	1 dokumen	Kota Madiun	
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi	4 dokumen	Kota Madiun	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	A Skor	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,	100 Persen	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	10 dokumen	Semua Kab/Kota	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah			Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah						Kota Madiun	
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 Persen	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	1 paket		Kota Madiun	
						6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	1 paket		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	100 Persen	6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan	100 %		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi	2 jenis		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak Digunakan	100 Persen	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	1 unit		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 unit		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana	5 jenis		Semua Kab/Kota Kota Madiun	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan	29 Dokumen	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	3 dokumen		Kota Madiun	
						6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil pengawasan	15 dokumen		Kota Madiun	
						6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil reviu	4 dokumen		Kota Madiun	

						6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	jumlah dokumen hasil reviu	3 dokumen	Kota Madiun	
						6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monev	4 dokumen	Kota Madiun	
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah dokumen hasil pengawasan	1 dokumen	Kota Madiun	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 Dokumen	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	Kota Madiun	
			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	6 Dokumen	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	4 dokumen	Kota Madiun	
						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen monev dan verifikasi	2 dokumen	Kota Madiun	
7.01 KECAMATAN										
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80 Skor	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
	Nilai SAKIP	A Skor		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %					
				Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %					
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
							Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen		
							jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	20 dokumen		

					7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen adminisrasi keuangan	100 %	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %		persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %		
			Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %					
					7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 Dokumen		
		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %		persentase peserta yang paham	100 %		
						presentase peserta yang paham	100 %		
		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Kota Madiun	
			Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %					
			Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	100 %					
					7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %		
						persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 %		

		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	100 %	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	11 Unit	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %					
			Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintah daerah	100 %					
					7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	Kota Madiun	
					7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang representatif	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						Persentase gedung kantor yang representatif	100 %		
					7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %		
						persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %		
		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa	100 %	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	

			urusan pemerintahan daerah						
			Persentase Tercukupinya pemeuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %					
		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %		persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	100 %		
			Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %		Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %		
			Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %					
					7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
					7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %		
						persentase gedung yang layak digunakan	100 %		

					7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 %		
						persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87.75 skor	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	Kota Madiun
	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor		Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %		Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100 %	
	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor		Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %		prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	
				Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %		prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	100 %	
				Persentase Terselenggaranya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %				
				Persentase Terselenggaranya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %				
				Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %				
				Persentase terselesaikannya rekomendasi di	100 %				

			kelurahan sesuai ketentuan						
			Persentase tersesaiskannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %					
			7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi / pertemuan	3 pertemuan	Kota Madiun
				persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah koordinasi/pertemuan	8 kali	
				Persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah Koordinasi/Pertemuan	3 kali	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	100 %	Kota Madiun
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	100 %	Kota Madiun
				Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %		Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	12 %	
				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %				
				Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %				

			pemberdayaan masyarakat						
			Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %					
			Persentase Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %					
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	Kota Madiun	
						Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket		
						Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	40 %		
						Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket		
					7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	30 %	Kota Madiun	
						Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	35 %		
						Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	40 %		
						Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	45 %		
						Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %		
						Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	40 %		
						Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %		
						Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	30 %		

						Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %		
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/pertemuan	12 Kali	Kota Madiun
				Persentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah Koordinasi/Pertemuan	24 kali	
				Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	15 pertemuan	
			7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	8 kali	Kota Madiun
				Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah koordinasi / pertemuan	8 pertemuan	
				Persentase Hasil Koordinasi Yang ditindak lanjuti	100 %		Jumlah Koordinasi/pertemuan	14 Kali	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah yang ditindak lanjuti	100 %	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	1 kali	Kota Madiun
				Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah Sosialisasi	1 kegiatan	
				Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %		Jumlah Sosialisasi	2 kali	
						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100 %	Kota Madiun
							Persentase Konflik yang terselesaikan	100 %	
						7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	2 dokumen	Kota Madiun
							Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	12 doku men	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan peralatan kantor yang representatif	100 %	Kota Madiun	
						8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
						8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase sarana prasarana kantor yang layak digunakan	100 %	Semua Kab/Kota Kota Madiun	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	150 orang	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	150 oran g	Kota Madiun	
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase kegiatan peendidikan politik kepada masyarakat	80 %	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	11 parpol	Kota Madiun	

ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										
						8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	125 orang	Kota Madiun	
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	71 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Prosentase tingkat keaktifan organisasi masyarakat	75 %	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah organisasi masyarakat yang terfasilitasi	109 orang	Kota Madiun	
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Kota Madiun	
						8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	200 orang	Kota Madiun	
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 Konflik	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta rakor	1055 orang	Kota Madiun	

Tabel 3.5.
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
							1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	Kota Madiun	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
							1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
							1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	7 Lembaga	Kota Madiun	
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	
								Jumlah Lembaga	1 Lembaga		
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	14 Bidang Kreatifitas	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	73 Lembaga	Kota Madiun	
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	
								Jumlah Lembaga	1 Lembaga		
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	2 Lembaga	Kota Madiun	
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	5.96 Siswa	Kota Madiun	
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	25 Lembaga	Kota Madiun	
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	14 Bidang Kreatifitas	Kota Madiun	
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	25 Lembaga	Kota Madiun	
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100%	Kota Madiun	
							1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100%	Kota Madiun	
							1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100%	Kota Madiun	
				1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal							
							1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100%	Kota Madiun	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
				1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru berprestasi	100%	Kota Madiun	
							1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	11 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
							1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	Kota Madiun		
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100%						
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
							1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%					
							1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0 Indek								
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	92.42 %					
							1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	2 unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 unit	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	21 jenis	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 jenis	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	11 jenis		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	2 kegiatan		
							1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi	24 jenis		
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	1 paket	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Jenis obat/vaksin yang diadakan	2 jenis		
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	Kota Madiun	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	100%		
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	7.9 %	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Menurunnya Prevalensi stunting	10%		
								Menurunnya Prevalensi stunting	11%		
								Menurunnya Prevalensi stunting	11.5 %		
								Menurunnya Prevalensi stunting	12%		
								Menurunnya Prevalensi stunting	9.5 %		
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	41%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	61%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prosentase penyakit menular yang angka kesakitan dan kematian menurun	100%	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	62.5 %		
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	87520 orang	Semua Kabupaten/Kota	
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	52%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	89%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								PKP Puskesmas	85%		
								PKP Puskesmas	88%		
								PKP Puskesmas	89.4 %		
								PKP Puskesmas	90%		
								PKP Puskesmas	80%		
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan operasional faskes	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	100%	Kota Madiun	
							1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya pelayanan gawat darurat	100%	Kota Madiun	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							
							1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	1 dokter	Kota Madiun	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	91%	Kota Madiun	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	86%	Kota Madiun	
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
							1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRT yang sehat	86%	Kota Madiun	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	6 jenis	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	60 kali	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
							1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Madiun	
							1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras yang terpenuhi	5 jenis	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Madiun	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
							1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	10 jenis	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang yang layak digunakan	100%					
							1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	59 buah	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 buah	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Banjir	0								
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah genangan	15%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%					
							1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	50 pemohon	Kota Madiun	
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	5 gedung	Kota Madiun	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	0%								
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	100%					
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	30 lokasi	Kota Madiun	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	10 dokumen	Kota Madiun	
							1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	5 hektar	Semua Kabupaten/Kota	
							1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen	2 dokumen	Kota Madiun	
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yg dibangun	1000 meter	Semua Kabupaten/Kota	
							1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas yang dilebarkan	6 ruas	Kota Madiun	
							1.03.10.2.01.07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah ruas yang ditambah lajurnya	1 ruas	Semua Kabupaten/Kota	
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan				
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	6 km	Kota Madiun	
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	28 ruas	Semua Kabupaten/Kota	
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	1 jembatan	Kota Madiun	
							1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan				
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	10 jembatan	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	0%								
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	200 orang					
							1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta	200 orang	Semua Kabupaten/Kota	
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah rekomendasi IUJK	200 orang					
							1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	50 BUJK	Kota Madiun	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	0%								
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang di tetapkan	1 dokumen					
							1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%					
							1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%					
							1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%					
							1.04.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%					
							1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%					
							1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	0%								
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	1 dokumen					
							1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	1 dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 lokasi					
							1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	1 lokasi	Semua Kabupaten/Kota	
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	100%		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	0%								
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %					
							1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %					
							1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	3 dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
							1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	3 lokasi	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0%								
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100%					
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi prasarana,sarana dan utilitas umum yang disediakan	3 lokasi	Semua Kabupaten/Kota	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%					
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100%		
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	100%					
							1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%					
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%		
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100%					
							1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%					
							1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase Pemenuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Representatif	100%		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	100%					
							1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase gedung yang layak digunakan	100%		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	100%		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	0%								
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	97%					
							1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	100%	Kota Madiun	
							1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	97%	Kota Madiun	
							1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	90%	Kota Madiun	
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	92%	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Berkompeten	80%	Kota Madiun	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%					
							1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	Kota Madiun	
							1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	100%	Kota Madiun	
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Berkompeten	100%					
							1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase PPNS Yang Berkompeten	100%	Kota Madiun	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Dltangani	0%								
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	Semua Kabupaten/Kota	
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%					
							1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparaturnya dan penduduk yang ikut pelatihan	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	100%	Semua Kabupaten/Kota	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0%								
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
							1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	80%	Kota Madiun	
							1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Kota Madiun	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90%					
							1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Didata	100%	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen					
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	12 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen					
							1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 persen					
							1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen					
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen					
							1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 persen	Kota Madiun	
							1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen					
							1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen					
							1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
							1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	0%								
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang dibina	91 persen					
							1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	135 orang	Kota Madiun	
							1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	80 orang	Kota Madiun	
							1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	1 lembaga	Kota Madiun	
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	5 Lembaga	Kota Madiun	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0%								
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tertangani	100 persen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	160 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	50 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan alat bantu	10 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	15 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	60 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	286 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	40 orang	Kota Madiun	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani	100 persen					
							1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	15 orang	Kota Madiun	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	150 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	105 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	7 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan	20 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	132 orang	Kota Madiun	
							1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang	Kota Madiun	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	0%								
				1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90 persen					
							1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	24 orang	Kota Madiun	
							1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	24 orang	Kota Madiun	
							1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	24 orang	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik									
				1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen					
							1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	1 paket	Kota Madiun	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%					
							2.07.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan cukai	100 orang	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	Kota Madiun	
							2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase tercukupinya Barang Milik Daerah	100%					
							2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%					
							2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	0%								
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	tersedianya peserta pelatihan yang berkompeten	220 orang					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	220 orang	Kota Madiun	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPTKS yang terakreditasi	20%					
							2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	4 pembinaan	Kota Madiun	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	0%								
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	225 orang					
							2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersediannya aplikasidan data ketenagakerjaan yang aktual	1 apLikasi dan dokumen	Kota Madiun	
							2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	175 orang	Kota Madiun	
							2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	50 orang	Kota Madiun	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Penurunan Kasus - Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	0%								
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	25%					
							2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	15 dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
							2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	200 perusahaan	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75%					
							2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	15 Kasus Terselesaikan	Kota Madiun	
							2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan SIAGAKITA	4000 orang	Kota Madiun	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	0%								
				2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase program yang di ARG	10 persen					
							2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen program yang di ARG	34 dokumen	Kota Madiun	
							2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor PUG	375 orang	Kota Madiun	
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	70 orang	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	75 orang	Kota Madiun	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi perempuan pada lembaga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	12.5 persen					
							2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	180 orang	Kota Madiun	
							2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	116 orang	Kota Madiun	
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	50 persen					
							2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	15 lembaga	Kota Madiun	
							2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	80 orang	Kota Madiun	
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	32 lembaga	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	67.39 persen					
							2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	50 orang	Kota Madiun	
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	50 orang	Kota Madiun	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	56 persen					
							2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	40 orang	Kota Madiun	
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 persen					
							2.08.03.2.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	20 klien	Kota Madiun	
							2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	30 orang	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	0%								
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peserta yang memahami kesetaraan gender dan hak anak	80 persen					
							2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	111 orang	Kota Madiun	
							2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	108 RT	Kota Madiun	
							2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	81 orang	Kota Madiun	
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang aktif dalam peningkatan kualitas keluarga dan hak anak	100 persen					
							2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	100 orang	Kota Madiun	
							2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	14 lembaga	Kota Madiun	
							2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	102 orang	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan hak anak	100 persen					
							2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	81 orang	Kota Madiun	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	0 Dokumen								
				2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen					
							2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	65 orang	Kota Madiun	
							2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	65 orang	Kota Madiun	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	0%								
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	12.55 persen					
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	100 orang	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	12.55 persen					
							2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	105 orang	Kota Madiun	
							2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	67 orang	Kota Madiun	
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	Kota Madiun	
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	90 orang	Kota Madiun	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0								
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sekolah yang terlibat dalam perlindungan anak	40.74 persen					
							2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	30 sekolah	Kota Madiun	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	48 persen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Daerah Kabupaten/Kota							
							2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	10 orang	Kota Madiun	
							2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	40 orang	Kota Madiun	
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak	100 persen					
							2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	60 orang	Kota Madiun	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%					
							2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	20 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%					
							2.09.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%					
							2.09.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%					
							2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	0%								
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	100%					
							2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen (NBM, Prognosa Kebutuhan, Neraca Pangan Strategis)	3 Dokumen	Kota Madiun	
							2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tertanganinya Kerawanan Pangan	27 Kelompok	Kota Madiun	
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir, tingkat eceran, tingkat produsen, rekapitulasi)	4 Dokumen	Kota Madiun	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	2100 kkal/kapita					
							2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	2 Dokumen	Kota Madiun	
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	2 kali	Kota Madiun	
							2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun	1 kali	Kota Madiun	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	0%								
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 kali					
							2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	200 Orang	Kota Madiun	
							2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	45 Sampel	Kota Madiun	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
	2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	0%								
				2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	100%					
							2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah sesuai ketentuan	100%	Semua Kabupaten/Kota	
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0%								
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	100%					
							2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa, konflik perkara pertanahan yang tertangani	100%	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Penatagunaan Tanah	0%								
				2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100%					
							2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data yang dapat disajikan	1 dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100 persen					
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen					
							2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 persen					
							2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	presentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 persen	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								(perhitungan = realisasi/target kebutuhan)		Kota Madiun	
							2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	presentase peningkatan kapasitas pegawai	100 persen	Kota Madiun	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen					
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (perhitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen					
							2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	Kota Madiun	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 persen					
							2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase pemenuhan gaji non ASN perangkat daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen					
							2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	presentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	Kota Madiun	
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	0%								
				2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	4 dokumen					
							2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	Kota Madiun	
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen					
							2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	Kota Madiun	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	0%								
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20 kali					
							2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20 kali	Kota Madiun	
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	3 kali	Kota Madiun	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	10 paket					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	4 wajib usaha					
							2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	3 perusahaan	Kota Madiun	
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	15 wajib usaha	Kota Madiun	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0%								
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	4 kegiatan					
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	4 kegiatan	Kota Madiun	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0%								
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10 kasus					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%		
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	100%	Kota Madiun	
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%					
							2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	Kota Madiun	
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%					
							2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100%					
							2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%					
							2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	0%								
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	20000 dokumen					
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekamana KTP EL	2500 data	Kota Madiun	
							2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	1000 dokumen	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	0%								
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	1700 dokumen					
							2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	1500 dokumen	Kota Madiun	
							2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian Non Muslim	200 dokumen	Kota Madiun	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi Database Kependudukan	0%								
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77%					
							2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	13 laporan	Kota Madiun	
							2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	10 dokumen	Kota Madiun	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
							2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur	Terbentuknya RPP Sekolah Siaga Kependudukan di 5 sekolah	100%		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
							2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terdatanya semua keluarga dalam Pendataan Keluarga (PK) 2021 di 18 kelurahan	100%	Kota Madiun	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										
				2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							
							2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	4 Jenis	Kota Madiun	
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangga Kencana (BKB, BKR, PIK R, UPPKS, BKL, IMP, PKB, PUS)	8 kelompok	Kota Madiun	
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	148 Kader	Kota Madiun	
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							
							2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokasi dan sarana penunjang pelayanan KB	22 Faskes	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%					
							2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%					
							2.15.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100%					
							2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%					
							2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	Kota Madiun	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitasi Perlengkapan Lalu Lintas	0%								
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya kebijakan	100%					
							2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik	75%					
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	100%	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	persentase perlengkapan jalan yang dipelihara	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Presentasi fasilitas parkir yang memiliki ijin	100%					
							2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	persentase fasilitas terminal yang layak	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	100%					
							2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase pengurusan ijin	100%	Kota Madiun	
							2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase movev penyelenggaraan parkir	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Lulus Uji	100%					
							2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	Kota Madiun	
							2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemohon yang paham	100%	Kota Madiun	
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	100%	Kota Madiun	
							2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase laporan	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen MRLL	6 kegiatan	Kota Madiun	
							2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengurusan rekomendasi Andalalin	100%					
							2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase pemenuhan rekomendasi	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan keselamatan	100%					
							2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peserta	100%	Kota Madiun	
							2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	persentase Jumlah kegiatan	100%	Kota Madiun	
							2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	persentase Jumlah kegiatan	100%	Kota Madiun	
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	100%					
							2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan yang melayani	41 kend	Kota Madiun	
							2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan barang	23000 kend	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%					
							2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Paket	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%					
							2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	0%								
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%					
							2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 berita	Kota Madiun	
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	5 media	Kota Madiun	
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	Kota Madiun	
							2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kelompok	Kota Madiun	
							2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan	1 Paket	Kota Madiun	
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	6 Tema informasi	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	0%								
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%					
							2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	238 domain	Kota Madiun	
							2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1750 titik	Kota Madiun	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	100%					
							2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 paket	Kota Madiun	
							2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	180 titik	Kota Madiun	
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	7 Aplikasi	Kota Madiun	
							2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	1 paket	Kota Madiun	
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	100%	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	150 orang					
							2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	150 orang	Kota Madiun	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen					
							2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen					
							2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen					
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/ perlengkapan kantor	100 persen	Kota Madiun	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang	100 persen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	milik daerah urusan pemerintah daerah						
							2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 persen					
							2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	0%								
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 paket					
							2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	1 dokumen	Kota Madiun	
							2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	1 paket	Kota Madiun	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	0%								
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	20 investor					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5 kegiatan	Kota Madiun	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	0%								
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pemohon izin	1600 izin					
							2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	80 orang	Kota Madiun	
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	persentase pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	15 persen	Kota Madiun	
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	55 kali	Kota Madiun	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	0 Perusahaan								
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dibina	110 perusahaan					
							2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	30 perusahaan	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	50 perusahaan	Kota Madiun	
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman modal	30 perusahaan	Kota Madiun	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Jenis Izin yang Diproses Secara Elektronik	0%								
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik	70 jenis izin					
							2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	35 izin	Kota Madiun	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda	0 orang								
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	1 event					
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	200 orang	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							2.22.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupi pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%					
							2.22.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%					
							2.22.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%					
							2.22.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	0%								
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	8 budaya					
							2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Obyek Pemajuan Budaya yang dimanfaatkan	8 budaya	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	33 festival	Kota Madiun	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina	0 Orang								
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	2 pelatihan					
							2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	40 orang	Kota Madiun	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	0%								
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 unit					
							2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	20 unit	Kota Madiun	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%					
							2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%					
							2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%					
							2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Madiun	
							2.23.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	0%								
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.3 %					
							2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	72 Perpustakaan	Semua Kabupaten/Kota	
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	3500 eksemplar	Semua Kabupaten/Kota	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	4100 eksemplar	Semua Kabupaten/Kota	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca	20 kali					
							2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2500 orang	Semua Kabupaten/Kota	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	0%								
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	168 eksemplar					
							2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	4 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	0%								
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	28%					
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	912 meter linier	Semua Kabupaten/Kota	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	250 nomor arsip					
							2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	250 berkas	Semua Kabupaten/Kota	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	0 Nilai								
				2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	0.01 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 orang					
							3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Monitoring Perikanan Tangkap	2 Dokumen	Kota Madiun	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	0 Kg/Kapital/Tahun								
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang					
							3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring Pengolah dan Pemasar Ikan	3 Dokumen	Kota Madiun	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	24 ton					
							3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	10 UMKM	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	0 destinasi								
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi					
							3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 lokasi	Kota Madiun	
							3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yg memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2 lokasi	Kota Madiun	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri	0 Event								
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	2 promosi					
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 event	Kota Madiun	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataan	0%								
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor pariwisata	18%					
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	2 event	Kota Madiun	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	0%								
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	75%					
							3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	39 lokasi	Kota Madiun	
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	2 Paket	Kota Madiun	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75%					
							3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi	12 lokasi	Kota Madiun	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	0%								
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	60%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80%					
							3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	3250 Ekor	Semua Kabupaten/Kota	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80%					
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	200 sampel	Kota Madiun	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian	0%								
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	1750 ha/thn					
							3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	10 ha	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Memiliki Izin Usaha Pertanian	0%								
				3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 jenis					
							3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Petani yang produksinya lolos uji layak mutu	4 Orang	Kota Madiun	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	0%								
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	78%					
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	1 paket	Kota Madiun	
							3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	1 Jenis	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%					
							3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100%					
							3.30.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase ijin yang diterbitkan	100%					
							3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	75 surat	Kota Madiun	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	0%								
				3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar					
							3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 pasar	Kota Madiun	
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 pasar	Kota Madiun	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Peningkatan omset Pasar Rakyat	3200000000 Rupiah					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pasar	2 kali	Kota Madiun	
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	118 orang	Kota Madiun	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	0%								
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100%					
							3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	3 kali	Kota Madiun	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100%					
							3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan	2 kali	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	0%								
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan					
							3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang	7000 uttp	Kota Madiun	
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	9 lokasi	Kota Madiun	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Perdagangan yang Dipromosikan	0 Produk								
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 kali					
							3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	4 kali	Kota Madiun	
							3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem Informasi baik baru dan pemeliharaannya	2 jenis	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	0%								
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perindustrian	2 dokumen					
							3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi	20 IKM	Kota Madiun	
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	40 IKM	Kota Madiun	
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	65 IKM	Kota Madiun	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	0%								
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM	4 kegiatan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	4 kali publikasi	Kota Madiun	
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Penduduk yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	0%								
				3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi penataan persebaran	100 orang					
							3.32.03.2.01.05 Penyuluhan Transmigrasi	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	1 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen					
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dokumen		
								jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja	6 dokumen		
								Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	21 dokumen		
								Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%		
								Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	21 dokumen		
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%					
							4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%		
								Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen		
								Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%		
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100%					
							4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota	
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%		
								Prosentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100%		
								Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%		
								Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100%		
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
							4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	100%		
							4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan dan mesin lainnya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	100 persen		
								Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	100%		
								Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin	3 unit		
							4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang	100%	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								milik daerah urusan pemerintahan daerah		Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%		
								Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	100%		
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen					
							4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%		
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		
								Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%		
								Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%		
								Prosentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%					
							4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100%		
								Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%		
								Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	100%		
								Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%		
								persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 persen		
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100%		
								Persentase gedung yang layak digunakan	100%		
								Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%		
								persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 persen		
								Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%		
							4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%		
								prosentase sarana/prasarana gedung yang representatif	100%		
								Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Representatif	100%		
								persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%		
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%					
							4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Kota Madiun	
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Kota Madiun	
				4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100%					
							4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	100%	Kota Madiun	
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	100%	Kota Madiun	
							4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	100%	Kota Madiun	
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.2 Indeks					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	Kota Madiun	
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2.85 Indeks	Kota Madiun	
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya minimal BB	100%	Kota Madiun	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100%					
							4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	500 kali	Kota Madiun	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0								
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%					
							4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	10 kali	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen rupa bumi	2 dokumen	Kota Madiun	
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	5 dokumen	Kota Madiun	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							
							4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	15 kegiatan	Kota Madiun	
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang tersusun	100 persen					
							4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	20 Perda/Raperda	Semua Kabupaten/Kota	
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	3 kegiatan	Semua Kabupaten/Kota	
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	3 jenis	Semua Kabupaten/Kota	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	5 kali	Kota Madiun	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										
				4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	3 kegiatan	Kota Madiun	
							4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	2 kegiatan	Kota Madiun	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	100%					
							4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	Kota Madiun	
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	12 dokumen	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	100%					
							4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tender/seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	100%	Kota Madiun	
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase tender/seleksi yang terumumkan di sistem LPSE	100%	Kota Madiun	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							
							4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100%	Kota Madiun	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%						
							4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100%						
							4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
							4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100%						
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional ASN	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100%						
							4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100%					
							4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan/Aset Kantor yang Dipelihara	100%					
							4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100%	Kota Madiun	
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100%					
							4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	12 Bulan	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	5 Jenis	Kota Madiun	
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	1 Kegiatan	Kota Madiun	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%					
							4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	4 Dokumen	Kota Madiun	
							4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional DPRD	100%	Kota Madiun	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	90,42 Skor								
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	100%					
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	15 raperda	Kota Madiun	
							4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kota Madiun	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100%					
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Pembahasan KUA-PPAS, KUPA-PPASP dan APBD , PAPBD sesuai jadwal/tepat waktu	4 Dokumen	Kota Madiun	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rekomendasi DPRD atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	1 Dokumen	Kota Madiun	
							4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	2 Dokumen	Kota Madiun	
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100%					
							4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD	Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis	180 Orang	Kota Madiun	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	50 Kegiatan	Kota Madiun	
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	2 Dokumen	Kota Madiun	
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang masuk RKPD	100%					
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap	90 Dokumen	Kota Madiun	
	5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
							5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
							5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatan kapasitas pegawai	100%	Kota Madiun	
							5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang memahami	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	1 kali	Kota Madiun	
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	1 kali	Kota Madiun	
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	1 kali	Kota Madiun	
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
							5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2 dokumen	Kota Madiun	
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	4 dokumen	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
							5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan	100%	Kota Madiun	
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen	14 dokumen	Kota Madiun	
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia	100%	Kota Madiun	
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							
							5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	1 dokumen	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
							5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	1 dokumen	Kota Madiun	
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1 dokumen	Kota Madiun	
							5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	1 dokumen	Kota Madiun	
							5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	1 dokumen	Kota Madiun	
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	20 dokumen					
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	20 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	100 persen		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan	100%					
							5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Prosentase Pemenuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100 Persen		
				5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%					
							5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase pemenuhan pakaian khusus hari tertentu	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase peserta yang paham	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen		
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD urusan pemerintahan daerah	100%					
							5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%					
							5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%					
							5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Jumlah kendaraan Dinas perorangan/jabatan digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 persen		
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase gedung yang layak digunakan	100 persen		
							5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Prosentase peralatan gedung/kantor yang layak digunakan	100 persen		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100%								
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Kota Madiun	
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen	2 dokumenDokumen	Kota Madiun	
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	34 Dokumen	Kota Madiun	
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	34 Dokumen	Kota Madiun	
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	Kota Madiun	
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	Kota Madiun	
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	Kota Madiun	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	100%					
							5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi kasda	55 Dokumen	Kota Madiun	
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Pengeluaran kas	3 Dokumen	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen					
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen					
							5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	45 ASN	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi koordinasi dan konsultasi	100 persen					
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	80 kali	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen					
							5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Jasa Peralatan Kantor	18 Jenis	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen					
							5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	19 kendaraan	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	2 Gedung	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarpras	8 Jenis	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM Perangkat Daerah	87,62 Score								
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	100 100					
							5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi ASN	250 formasi	Kota Madiun	
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah realisasi pemberhentian ASN	212 ASN	Semua Kabupaten/Kota	
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Update data kepegawaian	3000 dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 persen					
							5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pegawai Ditempatkan	209 ASN	Semua Kabupaten/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK	475 dokumen	Semua Kabupaten/Kota	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan kompetensi ASN	100 persen					
							5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta	280 Peserta	Semua Kabupaten/Kota	
							5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Peserta	40 Peserta	Semua Kabupaten/Kota	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase pelanggaran disiplin pegawai	0.3 persen					
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pegawai Dibina	515 pegawai	Semua Kabupaten/Kota	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	0%								
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100 persen					
							5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	226 Peserta	Semua Kabupaten/Kota	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	85 persen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta	240 Peserta	Semua Kabupaten/Kota	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							
							5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah dokumen penelitian/kajian	2 dokumen	Kota Madiun	
							5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen data kelitbangan	1 dokumen	Kota Madiun	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	4 dokumen	Kota Madiun	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen					
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	10 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 Persen					
							6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	1 paket	Kota Madiun	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	1 paket	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	100 Persen					
							6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi	2 jenis	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak Digunakan	100 Persen					
							6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	1 unit	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 unit	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana	5 jenis	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 Dokumen					
							6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	Kota Madiun	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	6 Dokumen					
							6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	4 dokumen	Kota Madiun	
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen monev dan verifikasi	2 dokumen	Kota Madiun	
	7.01 KECAMATAN										
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80 Skor					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	20 dokumen		
								Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen		
							7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	Kota Madiun	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					
							7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%		
								Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 Dokumen		
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%					
							7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase peserta yang memahami	100%		
								presentase peserta yang paham	100%		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah							
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Kota Madiun	
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%		
								persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan	100%					
							7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	11 Unit	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Kota Madiun	
							7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang representatif	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								persentase gedung kantor yang representatif	100%		
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan	2 Paket	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%					
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100%		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%					
							7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
								Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100%		
								persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
							7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terelesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%	Kota Madiun	
								Prosentase terelesaikannya permohonan rekomendasi	100%		
								Persentase Terelesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
								Persentase Terelesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
								Persentase Terelesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
								Persentase Terelesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
								prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
								prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	100%		
								prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
								prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
								prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100%		
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi/pertemuan	8 kali	Kota Madiun	
								Jumlah Koordinasi/Pertemuan	3 kali		
								Jumlah koordinasi / pertemuan	3 pertemuan		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	90 Usulan								
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%					
							7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	100%	Kota Madiun	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	12%	Kota Madiun	
								Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	100%		
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	Kota Madiun	
								Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket		
								Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket		
								Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket		
								Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	40%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket		
								Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket		
								Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket		
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100%	Kota Madiun	
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	30%		
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	35%		
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	40%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	45%		
								Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	40%		
								Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	30%		
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100%		
								Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%		
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100%		
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100%		
								Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100%		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	0%								
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah yang ditindak lanjuti	100%					
							7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	2 kali	Kota Madiun	
								Jumlah Sosialisasi	1 kegiatan		
								Jumlah Sosialisasi	1 kali		
							7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100%	Kota Madiun	
								Persentase Konflik yang terselesaikan	100%		
								Persentase konflik yang terselesaikan	100%		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	Kota Madiun	
								Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen		
								Jumlah buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	2 dokumen		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%					
							8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	12 dokumen	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%					
							8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan peralatan kantor yang representatif	100%	Kota Madiun	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%					
							8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	
							8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	Semua Kabupaten/Kota Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase kegiatan peendidikan politik kepada masyarakat	80%					
							8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	11 parpol	Kota Madiun	
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	125 orang	Kota Madiun	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	72,91%								
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Prosentase tingkat keaktifan organisasi masyarakat	75%					
							8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah organisasi masyarakat yang terfasilitasi	109 orang	Kota Madiun	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100%								
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali					
							8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	Kota Madiun	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	200 orang	Kota Madiun	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0								
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik					
							8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta rakor	1055 orang	Kota Madiun	

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi

Berdasarkan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, maka plafon anggaran sementara Kota Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	272.372.742.875	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	272.372.742.875	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	228.910.187.774	
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.130.881.282	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.739.590.464	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.739.590.464	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	184.218.676.428	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	184.218.676.428	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.493.389.290	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.212.439.290	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.950.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.225.100	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.242.800	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	382.278.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.704.300	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	23.640.998.746	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.290.657.751	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.201.213.200	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	519.630.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	569.814.551	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.886.049.180	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	4.590.763.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.384.371.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	227.974.415	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	582.173.405	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.767.360	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.563.920.185	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	319.425.865	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.600.000.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	4.644.494.320	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	900.371.630	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	900.371.630	
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.480.307.746	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.885.323.588	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.244.648.568	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	924.010.610	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	716.664.410	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	594.984.158	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	594.984.158	
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.658.000.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.658.000.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.292.000.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	366.000.000	
1.01.0.00.0.00.01.01	SDN 01 Kartoharjo	699.060.445	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	699.060.445	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	699.060.445	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	360.480.445	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	338.580.000	
1.01.0.00.0.00.01.02	SDN 02 Kartoharjo	183.106.723	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	183.106.723	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	183.106.723	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	136.576.723	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.530.000	
1.01.0.00.0.00.01.03	SDN 03 Kartoharjo	268.565.500	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	268.565.500	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	268.565.500	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	208.175.500	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.390.000	
1.01.0.00.0.00.01.04	SDN 01 Klegen	630.085.150	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	630.085.150	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	630.085.150	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	285.565.150	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	344.520.000	
1.01.0.00.0.00.01.05	SDN 02 Klegen	294.635.638	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	294.635.638	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	294.635.638	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	167.915.638	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126.720.000	
1.01.0.00.0.00.01.06	SDN 03 Klegen	654.503.000	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	654.503.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	654.503.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	310.973.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	343.530.000	
1.01.0.00.0.00.01.07	SDN 04 Klegen	216.735.965	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	216.735.965	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	216.735.965	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	128.625.965	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	88.110.000	
1.01.0.00.0.00.01.08	SDN Oro Oro Ombo	548.947.320	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	548.947.320	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	548.947.320	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	297.487.320	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	251.460.000	
1.01.0.00.0.00.01.09	SDN 01 Rejomulyo	214.966.400	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	214.966.400	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	214.966.400	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	117.946.400	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.020.000	
1.01.0.00.0.00.01.10	SDN 02 Rejomulyo	206.654.250	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	206.654.250	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	206.654.250	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	154.184.250	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.470.000	
1.01.0.00.0.00.01.11	SDN 01 Kanigoro	290.651.450	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	290.651.450	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	290.651.450	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	212.441.450	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	78.210.000	
1.01.0.00.0.00.01.12	SDN 02 Kanigoro	366.851.885	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	366.851.885	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	366.851.885	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	204.491.885	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	162.360.000	
1.01.0.00.0.00.01.13	SDN 03 Kanigoro	443.350.533	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	443.350.533	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	443.350.533	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	280.000.533	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	163.350.000	
1.01.0.00.0.00.01.14	SDN Sukosari	152.896.200	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	152.896.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	152.896.200	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	118.396.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.500.000	
1.01.0.00.0.00.01.15	SDN Pilangbango	562.698.250	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	562.698.250	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	562.698.250	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	361.728.250	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200.970.000	
1.01.0.00.0.00.01.16	SDN 01 Tawangrejo	338.946.200	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	338.946.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	338.946.200	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	175.596.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	163.350.000	
1.01.0.00.0.00.01.17	SDN 02 Tawangrejo	203.829.218	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.829.218	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	203.829.218	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	120.669.218	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.160.000	
1.01.0.00.0.00.01.18	SDN Kelun	339.158.240	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	339.158.240	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	339.158.240	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	167.888.240	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	171.270.000	
1.01.0.00.0.00.01.19	SDN 01 Manguharjo	585.656.000	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	585.656.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	585.656.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	299.546.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	286.110.000	
1.01.0.00.0.00.01.20	SDN 01 Nambangan Lor	569.326.113	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	569.326.113	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	569.326.113	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	268.426.113	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.900.000	
1.01.0.00.0.00.01.21	SDN 02 Nambangan Lor	277.137.800	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	277.137.800	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	277.137.800	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.417.800	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126.720.000	
1.01.0.00.0.00.01.22	SDN 01 Madiun Lor	282.101.300	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	282.101.300	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	282.101.300	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	166.271.300	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	115.830.000	
1.01.0.00.0.00.01.23	SDN 02 Madiun Lor	225.748.495	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	225.748.495	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	225.748.495	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	108.928.495	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	116.820.000	
1.01.0.00.0.00.01.24	SDN 03 Madiun Lor	1.072.681.875	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.072.681.875	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.072.681.875	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	579.661.875	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	493.020.000	
1.01.0.00.0.00.01.25	SDN 04 Madiun Lor	630.516.200	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	630.516.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	630.516.200	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	296.886.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	333.630.000	
1.01.0.00.0.00.01.26	SDN 05 Madiun Lor	853.173.500	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	853.173.500	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	853.173.500	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	407.673.500	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	445.500.000	
1.01.0.00.0.00.01.27	SDN 01 Nambangan Kidul	390.861.553	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	390.861.553	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	390.861.553	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	267.111.553	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	123.750.000	
1.01.0.00.0.00.01.28	SDN 02 Nambangan Kidul	243.797.225	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	243.797.225	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	243.797.225	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	151.727.225	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	92.070.000	
1.01.0.00.0.00.01.29	SDN 03 Nambangan Kidul	620.161.395	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	620.161.395	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	620.161.395	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	296.431.395	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	323.730.000	
1.01.0.00.0.00.01.30	SDN 04 Nambangan Kidul	252.001.715	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	252.001.715	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	252.001.715	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	125.281.715	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126.720.000	
1.01.0.00.0.00.01.31	SDN 01 Winongo	569.843.986	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	569.843.986	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	569.843.986	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	247.103.986	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	322.740.000	
1.01.0.00.0.00.01.32	SDN 02 Winongo	185.809.750	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	185.809.750	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	185.809.750	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	132.349.750	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	53.460.000	
1.01.0.00.0.00.01.33	SDN Ngegong	261.375.600	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	261.375.600	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	261.375.600	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	102.975.600	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.400.000	
1.01.0.00.0.00.01.34	SDN Patihan	553.145.150	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	553.145.150	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	553.145.150	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	250.205.150	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	302.940.000	
1.01.0.00.0.00.01.35	SDN 01 Pangongangan	224.603.350	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	224.603.350	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	224.603.350	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	152.333.350	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.270.000	
1.01.0.00.0.00.01.36	SDN 02 Pangongangan	629.981.468	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	629.981.468	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	629.981.468	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	330.011.468	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	299.970.000	
1.01.0.00.0.00.01.37	SDN Sogaten	307.734.705	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	307.734.705	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	307.734.705	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	136.464.705	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	171.270.000	
1.01.0.00.0.00.01.38	SDN 01 Taman	794.830.863	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	794.830.863	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	794.830.863	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	364.180.863	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	430.650.000	
1.01.0.00.0.00.01.39	SDN 02 Taman	211.937.585	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	211.937.585	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	211.937.585	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	135.707.585	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.230.000	
1.01.0.00.0.00.01.40	SDN 03 Taman	330.608.350	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	330.608.350	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	330.608.350	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	224.678.350	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	105.930.000	
1.01.0.00.0.00.01.41	SDN 01 Pandean	597.925.983	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	597.925.983	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	597.925.983	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	262.315.983	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	335.610.000	
1.01.0.00.0.00.01.42	SDN 02 Pandean	710.079.950	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	710.079.950	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	710.079.950	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	392.289.950	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	317.790.000	
1.01.0.00.0.00.01.43	SDN Banjarejo	810.678.770	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	810.678.770	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	810.678.770	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	394.878.770	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	415.800.000	
1.01.0.00.0.00.01.44	SDN 01 Mojorejo	304.014.700	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	304.014.700	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	304.014.700	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	202.044.700	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101.970.000	
1.01.0.00.0.00.01.45	SDN 02 Mojorejo	929.257.865	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	929.257.865	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	929.257.865	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	422.377.865	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	506.880.000	
1.01.0.00.0.00.01.46	SDN 01 Manisrejo	632.330.660	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	632.330.660	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	632.330.660	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	297.710.660	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	334.620.000	
1.01.0.00.0.00.01.47	SDN 02 Manisrejo	552.977.263	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	552.977.263	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	552.977.263	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	256.967.263	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	296.010.000	
1.01.0.00.0.00.01.48	SDN 03 Manisrejo	342.826.620	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	342.826.620	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	342.826.620	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	178.486.620	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	164.340.000	
1.01.0.00.0.00.01.49	SDN 04 Manisrejo	453.504.983	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	453.504.983	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	453.504.983	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	261.444.983	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	192.060.000	
1.01.0.00.0.00.01.50	SDN 01 Demangan	280.972.075	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	280.972.075	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	280.972.075	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	149.302.075	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	131.670.000	
1.01.0.00.0.00.01.51	SDN 02 Demangan	305.131.800	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	305.131.800	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	305.131.800	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	143.761.800	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	161.370.000	
1.01.0.00.0.00.01.52	SDN 01 Josenan	396.349.700	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	396.349.700	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	396.349.700	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	219.139.700	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	177.210.000	
1.01.0.00.0.00.01.53	SDN 02 Josenan	324.150.750	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	324.150.750	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	324.150.750	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.900.750	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	173.250.000	
1.01.0.00.0.00.01.54	SDN 03 Josenan	204.348.200	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	204.348.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	204.348.200	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	116.238.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	88.110.000	
1.01.0.00.0.00.01.55	SDN Kejuron	208.683.850	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	208.683.850	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.683.850	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	156.213.850	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.470.000	
1.01.0.00.0.00.01.56	SDN Kuncen	254.308.001	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	254.308.001	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	254.308.001	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	178.078.001	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.230.000	
1.01.0.00.0.00.01.57	SMPN 1	1.694.318.858	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.694.318.858	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.694.318.858	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	771.088.858	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	923.230.000	
1.01.0.00.0.00.01.58	SMPN 2	1.938.218.150	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.938.218.150	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.938.218.150	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.007.728.150	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	930.490.000	
1.01.0.00.0.00.01.59	SMPN 3	1.210.063.100	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.210.063.100	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.210.063.100	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	532.463.100	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	677.600.000	
1.01.0.00.0.00.01.60	SMPN 4	1.675.788.950	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.675.788.950	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.675.788.950	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	689.638.950	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	986.150.000	
1.01.0.00.0.00.01.61	SMPN 5	1.146.726.505	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.146.726.505	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.146.726.505	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	614.326.505	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	532.400.000	
1.01.0.00.0.00.01.62	SMPN 6	1.450.186.545	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.450.186.545	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.450.186.545	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	681.836.545	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	768.350.000	
1.01.0.00.0.00.01.63	SMPN 7	1.567.385.650	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.567.385.650	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.567.385.650	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	685.295.650	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	882.090.000	
1.01.0.00.0.00.01.64	SMPN 8	1.060.406.760	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.060.406.760	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.060.406.760	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	411.846.760	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	648.560.000	
1.01.0.00.0.00.01.65	SMPN 9	1.143.099.255	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.143.099.255	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.143.099.255	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	638.529.255	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	504.570.000	
1.01.0.00.0.00.01.66	SMPN 10	1.469.389.545	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.469.389.545	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.469.389.545	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	855.919.545	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	613.470.000	
1.01.0.00.0.00.01.67	SMPN 11	1.374.779.867	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.374.779.867	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.374.779.867	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	599.169.867	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	775.610.000	
1.01.0.00.0.00.01.68	SMPN 12	1.464.914.350	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.464.914.350	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.464.914.350	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	697.774.350	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	767.140.000	
1.01.0.00.0.00.01.69	SMPN 13	1.429.619.233	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.429.619.233	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.429.619.233	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	575.359.233	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	854.260.000	
1.01.0.00.0.00.01.70	SMPN 14	841.440.818	
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	841.440.818	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	841.440.818	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	415.520.818	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	425.920.000	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	226.223.133.161	
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	226.223.133.161	
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85.807.770.213	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.356.884.556	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.609.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	307.609.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.866.091.556	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.866.091.556	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.643.040.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.103.680.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539.360.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.144.000	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.210.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.019.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.915.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	50.882.156.157	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.550.848.389	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.262.483.464	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	101.444.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.334.796.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	852.124.925	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.331.307.768	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	341.250.020	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	59.001.600	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.630.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	204.380.050	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.899.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	222.209.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	52.593.100	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.477.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	29.020.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	171.966.200	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	220.133.900	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	327.297.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	680.429.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.852.900	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	86.024.400	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	553.124.540	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	132.280.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	162.910.950	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	213.562.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	38.558.233.280	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	155.779.200	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.778.847.328	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	489.298.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	817.108.800	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	218.691.500	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	48.750.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48.750.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.941.500	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.941.500	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	226.563.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	196.057.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	196.057.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30.506.000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30.506.000	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.123.475.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	354.582.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	354.582.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	768.893.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	768.893.000	
1.02.2.14.0.00.03.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	118.778.629.068	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.999.252.852	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.209.552.852	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.209.552.852	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.700.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.700.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	76.550.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.550.000.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.779.376.216	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.779.376.216	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.758.714.000	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.285.228.971	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.068.801.445	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.668.510.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.998.121.800	
1.02.2.14.0.00.03.02	Puskesmas Manguharjo	3.643.648.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.643.648.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.643.648.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	513.002.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	266.050.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.864.596.000	
1.02.2.14.0.00.03.03	Puskesmas Patihan	3.082.393.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.082.393.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.082.393.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	509.810.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212.330.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.360.253.000	
1.02.2.14.0.00.03.04	Puskesmas Oro Oro Ombo	3.635.957.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.635.957.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.635.957.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	545.040.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	281.900.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.809.017.000	
1.02.2.14.0.00.03.05	Puskesmas Tawangrejo	3.421.643.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.421.643.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.421.643.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	564.295.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.475.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.607.873.000	
1.02.2.14.0.00.03.06	Puskesmas Banjarejo	4.281.393.000	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.281.393.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.281.393.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	580.632.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	346.215.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.354.546.000	
1.02.2.14.0.00.03.07	Puskesmas Demangan	3.571.699.880	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.571.699.880	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.571.699.880	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	535.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	326.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.710.699.880	
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	127.187.727.320	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.187.727.320	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.187.727.320	
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.580.000.000	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.000.000.000	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.000.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.480.000.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.480.000.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.000.000	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.000.000	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	390.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.199.043.440	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.199.043.440	
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	4.561.050.400	
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	3.992.153.000	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.547.050.040	
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.098.790.000	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	101.669.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	101.669.000	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	101.669.000	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	24.111.567.050	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.111.567.050	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	997.400.000	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	20.513.921.040	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.600.246.010	
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.287.156.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15.287.156.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	220.000.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15.067.156.000	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.026.307.970	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	13.026.307.970	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	13.026.307.970	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	45.461.983.860	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	45.461.983.860	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.206.950.000	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	5.031.500.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	408.530.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	16.338.318.240	
1.03.10.2.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	3.713.780.000	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	13.384.620.420	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.525.135.200	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	2.627.550.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	225.600.000	
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	540.000.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	270.000.000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	270.000.000	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	270.000.000	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	270.000.000	
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.880.000.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.110.000.000	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	180.000.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	850.000.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	80.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	330.000.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	440.000.000	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	440.000.000	
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	37.918.652.656	
1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.918.652.656	
1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.918.652.656	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.713.951.926	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.135.000.000	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.074.000.000	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.000.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.010.000	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.010.000	
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.880.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.880.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.791.650	
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.892.300	
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.899.350	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.174.500.844	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.174.500.844	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.936.769.432	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.470.961.432	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425.808.000	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.171.611.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	87.500.000	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	87.500.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.334.111.000	
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.334.111.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	750.000.000	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	750.000.000	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.757.500.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	102.000.000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	102.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.655.500.000	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	212.000.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.458.500.000	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2.985.000.000	
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	20.275.589.730	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	20.275.589.730	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	20.275.589.730	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.342.853.000	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.542.853.000	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.542.853.000	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.609.780.000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.721.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.721.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.458.061.000	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.458.061.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	495.842.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	495.842.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.585.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.585.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.965.000	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.965.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.870.506.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.870.506.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.100.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.100.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.643.545.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.226.549.000	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.063.016.000	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.247.315.000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	152.772.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	403.895.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	359.551.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	382.545.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	167.168.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	215.377.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	34.451.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	34.451.000	
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.289.528.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.406.000	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	918.928.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	299.478.000	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	71.122.000	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	71.122.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.800.000.000	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.800.000.000	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.082.695.000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.276.195.000	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.276.195.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510.000.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	510.000.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.500.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.717.305.000	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	210.565.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	85.000.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	125.565.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.411.740.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	141.350.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	90.000.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	95.000.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.085.390.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95.000.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	95.000.000	
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.778.401.003	
1.06.2.08.0.00.02.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.778.401.003	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.06.2.08.0.00.02.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24.778.401.003	
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.923.449.755	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.831.480	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.831.480	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.397.131.311	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.416.261	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.715.050	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.774.400	
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.774.400	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.901.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.901.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.550.000	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	296.550.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.479.495.914	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.149.315.914	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.180.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.765.650	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.634.200	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.131.450	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.846.611.695	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.846.611.695	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	288.333.700	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	77.014.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	321.677.500	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.159.586.495	
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.742.901.123	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.295.044.666	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	213.655.500	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	50.505.771	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	44.173.250	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.300.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.700.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	745.285.475	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	132.424.670	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	447.856.457	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	199.014.605	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	89.275.500	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	20.646.890	
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	10.400.830	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	7.971.592	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	102.347.040	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.200.000	
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.313.296.100	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	7.840.000	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3.600.000	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.040.000	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.305.456.100	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.231.132.150	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	851.783.150	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.120.538.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	102.002.800	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	766.036.250	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	161.799.100	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	40.269.900	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	15.178.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	106.351.200	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	604.237.150	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	130.627.400	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	473.609.750	
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	186.106.080	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	186.106.080	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	186.106.080	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.136.843.807	
2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	8.136.843.807	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	8.136.843.807	
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.009.446.755	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.280.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.280.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.597.300.000	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.597.300.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.119.850.000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	885.850.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.000.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.716.755	
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.673.000	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.043.755	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.300.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.550.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.250.000	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.500.000	
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	862.016.290	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	812.016.290	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	812.016.290	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000	
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	545.866.522	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	545.866.522	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	217.347.107	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	128.245.575	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	200.273.840	
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.719.514.240	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	268.952.240	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	47.615.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	221.337.240	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.450.562.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107.768.440	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.342.793.560	
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.700.506.802	
1.06.2.08.0.00.02.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.700.506.802	
1.06.2.08.0.00.02.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.700.506.802	
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	846.501.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	303.301.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	135.718.050	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	57.775.550	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100.090.620	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	9.716.780	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	173.850.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	67.100.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	106.750.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	369.350.000	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.216.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.046.150	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.087.850	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	250.155.865	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	53.143.795	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.619.285	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.524.510	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	162.140.250	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	162.140.250	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.871.820	
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	24.659.820	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.212.000	
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	836.784.054	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.270.900	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.247.400	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60.880.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	74.143.500	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	457.573.954	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.950.000	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.510.000	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	339.113.954	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	187.939.200	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	187.939.200	
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	229.549.120	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.549.120	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	85.116.770	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	144.432.350	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	409.276.685	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.659.865	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	59.659.865	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	349.616.820	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.427.695	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.036.705	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.233.250	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.919.170	
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	128.240.078	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	52.185.560	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.185.560	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.881.439	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3.850.000	
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	51.031.439	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.173.079	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.173.079	
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.077.071.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.077.071.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.077.071.000	
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.307.071.000	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.000.000	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	136.000.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.892.000.000	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.892.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.071.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.071.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.350.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	968.350.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.650.000	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.650.000	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	595.000.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	300.000.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	60.000.000	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	180.000.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	60.000.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	295.000.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	45.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	200.000.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	50.000.000	
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	175.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	434.000.000	
1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	434.000.000	
1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	434.000.000	
02.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	17.800.000	
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.800.000	
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	17.800.000	
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	36.200.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000	
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	380.000.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	380.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	80.000.000	
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000	
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.902.106.915	
2.11.0.00.0.00.05.0000	Dinas Lingkungan Hidup	23.902.106.915	
2.11.0.00.0.00.05.0000	Dinas Lingkungan Hidup	23.902.106.915	
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.120.269.915	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.856.372.010	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.856.372.010	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.000.000	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125.000.000	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.000.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.883.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.883.000	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.696.195	
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.696.195	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.446.280.610	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.230.240.610	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.216.040.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.398.038.100	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.205.994.200	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.125.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.918.900	
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	430.000.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	255.000.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	255.000.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	175.000.000	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	175.000.000	
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.165.137.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	770.637.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	412.850.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	357.787.000	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	394.500.000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	250.000.000	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	144.500.000	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	56.500.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	56.500.000	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	56.500.000	
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.500.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	41.500.000	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	41.500.000	
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	390.000.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	390.000.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	260.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	670.000.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	670.000.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	670.000.000	
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	94.000.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	94.000.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	39.000.000	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	55.000.000	
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.934.700.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	4.843.700.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	235.600.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.998.400.000	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.609.700.000	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	91.000.000	
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	91.000.000	
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.885.228.540	
2.12.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.885.228.540	
2.12.2.24.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.885.228.540	
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.886.374.935	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.018.360	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	84.819.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.767.360	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.432.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.030.000.000	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.030.000.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.811.000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	194.811.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.270.609.278	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.117.648.278	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.961.000	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.784.238	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.784.238	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.620.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.620.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.532.059	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.500.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.124.500	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.907.559	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	233.627.050	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	233.627.050	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	133.074.125	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	100.552.925	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	402.719.632	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	402.719.632	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	110.536.272	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	292.183.360	
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	362.506.923	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	362.506.923	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	308.105.990	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	54.400.933	
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.005.224.830	
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.005.224.830	
1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.005.224.830	
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	520.081.430	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	21.621.200	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	21.621.200	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	498.460.230	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	498.460.230	
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.806.958.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	340.290.000	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	120.042.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	220.248.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	129.600.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	129.600.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.184.956.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.766.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.224.894.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	908.296.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	152.112.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	152.112.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	678.185.400	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	678.185.400	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.399.550	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	602.785.850	
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	20.212.025.600	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	20.212.025.600	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	20.212.025.600	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.030.976.600	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.200.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140.200.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.514.480.000	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.514.480.000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	221.261.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	125.000.000	
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.261.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.570.385.600	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.570.385.600	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.650.000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	284.650.000	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.181.049.000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.639.975.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.490.575.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.149.400.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	38.250.000	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	38.250.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	868.469.000	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	168.469.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	700.000.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	745.480.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	155.550.000	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	48.395.000	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	105.950.000	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	435.585.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	140.200.000	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.000.000	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.200.000	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	368.035.000	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	368.035.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.495.880.000	
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	60.000.000	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.386.880.000	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	49.000.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.834.760.000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.011.860.000	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	822.900.000	
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.324.377.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.324.377.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.324.377.000	
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.946.939.000	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.783.741.000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.783.741.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000.000	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.228.338.000	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.228.338.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.860.000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.500.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.500.000	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.860.000	
02.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.789.955.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.789.955.000	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2.289.955.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.500.000.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	250.000.000	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	300.000.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	350.000.000	
02.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	10.587.483.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.100.000.000	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.000.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.487.483.000	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.978.005.000	
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	400.000.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	460.000.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	302.553.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100.000.000	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	186.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	60.925.000	
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.158.338.800	
2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.158.338.800	
2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.158.338.800	
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	624.176.900	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	624.176.900	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	624.176.900	
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	224.161.900	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	224.161.900	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	224.161.900	
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	310.000.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	310.000.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	310.000.000	
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.203.016.150	
2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.203.016.150	
2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.203.016.150	
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.420.298.000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.370.000	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.370.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.900.000.000	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.132.310.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	932.310.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.600.000	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.600.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.018.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.018.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	161.250.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	161.250.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	61.250.000	
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	294.755.750	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	294.755.750	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	294.755.750	
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	626.851.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	626.851.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	240.442.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	236.409.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	150.000.000	
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	525.800.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	525.800.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.815.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	454.985.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20.000.000	
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	174.061.400	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.061.400	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	174.061.400	
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.209.615.445	
2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	3.209.615.445	
2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	3.209.615.445	
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	475.000.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	475.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	475.000.000	
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.734.615.445	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.203.197.370	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.203.197.370	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	404.609.015	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	404.609.015	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.000.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.000.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	126.809.060	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	126.809.060	
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	500.000.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000	
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	500.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	295.000.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	55.000.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	150.000.000	
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	350.000.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.000.000	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.000.000	
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	350.000.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	50.000.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.529.586.820	
2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	7.529.586.820	
2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	7.529.586.820	
02.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.054.839.300	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.202.119.300	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.202.119.300	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.700.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.700.000	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.790.000	
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.790.000	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.337.115.000	
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.337.115.000	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.115.000	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.115.000	
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.259.314.150	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.259.314.150	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.067.529.815	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	191.784.335	
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	123.886.145	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	123.886.145	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	123.886.145	
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	91.547.225	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	91.547.225	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	91.547.225	
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.104.892.447	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.104.892.447	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.104.892.447	
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.543.547.447	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.867.787.447	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.867.787.447	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	527.860.000	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	527.860.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.000.000	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	790.000.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.900.000	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.900.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000	
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.000.000	
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.461.345.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	729.060.000	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	506.386.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	155.324.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	67.350.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	732.285.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	732.285.000	
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100.000.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	100.000.000	
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	800.916.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.916.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.916.000	
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	651.625.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	342.140.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	342.140.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	309.485.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	309.485.000	
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	149.291.000	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	149.291.000	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	70.390.000	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	78.901.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	925.000.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	925.000.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	925.000.000	
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	395.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	395.000.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	225.000.000	
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	80.000.000	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	80.000.000	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	80.000.000	
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	450.000.000	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	150.000.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	150.000.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	300.000.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.423.150.050	
2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	1.423.150.050	
2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	1.423.150.050	
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	489.048.300	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	489.048.300	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	224.048.300	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	265.000.000	
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	547.528.750	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	547.528.750	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	547.528.750	
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	386.573.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	386.573.000	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	386.573.000	
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.593.999.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.593.999.000	
2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.593.999.000	
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.781.771.600	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.581.771.600	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	50.000.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.531.771.600	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	200.000.000	
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	321.000.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	200.000.000	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	200.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	121.000.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	22.000.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	44.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	55.000.000	
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	175.000.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100.000.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	75.000.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	75.000.000	
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	111.750.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	111.750.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	111.750.000	
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.000.000	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	50.000.000	
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	154.477.400	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	154.477.400	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	42.905.000	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	111.572.400	
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15.347.800.000	
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	15.347.800.000	
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	15.347.800.000	
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.499.396.897	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
	KABUPATEN/KOTA		
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.007.200	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.007.200	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.616.000.000	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.616.000.000	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.699.000	
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	174.699.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.010.800	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.010.800	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.681.807	
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.016.681.807	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.998.090	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.515.740	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.978.750	
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.503.600	
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	107.083.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	107.083.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	107.083.000	
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.202.899.418	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.275.495.040	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	213.350.000	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.062.145.040	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.927.404.378	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	670.330.383	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.257.073.995	
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	77.500.800	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	75.089.600	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	75.089.600	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.411.200	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.411.200	
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	216.946.035	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	216.946.035	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	204.753.055	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	12.192.980	
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	243.973.850	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	243.973.850	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	135.387.400	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	108.586.450	
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	862.483.665	
2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	862.483.665	
2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	862.483.665	
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	365.380.370	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	365.380.370	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	84.269.040	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	55.713.160	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	225.398.170	
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	497.103.295	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	497.103.295	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	497.103.295	
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	14.850.000	
2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.850.000	
2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.850.000	
03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	14.850.000	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.850.000	
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	14.850.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	57.262.138.860	
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	57.262.138.860	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	3.137.043.250	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	934.234.250	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.522.500	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.522.500	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	499.157.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
	Daerah		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	499.157.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.163.250	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.163.250	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.891.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.891.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.500.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.202.809.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.769.469.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.379.469.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	90.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	300.000.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	433.340.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	433.340.000	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Organisasi	2.610.646.998	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.610.646.998	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	437.447.500	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	437.447.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.326.280	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.326.280	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.847.108	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.847.108	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.873.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.963.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.680.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.230.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.744.153.110	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	450.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	745.153.110	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	549.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum	2.584.597.920	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.642.838.620	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.923.200	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.923.200	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.119.923.300	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.119.923.300	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.500.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.551.400	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.551.400	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.940.720	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.547.600	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.893.120	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	941.759.300	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	941.759.300	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	388.850.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	282.928.800	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	269.980.500	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	3.195.171.000	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.594.471.000	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.636.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.636.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.233.270.000	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.233.270.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.194.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.194.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.300.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.300.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.091.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363.091.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.980.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.321.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	826.000.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.659.000	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	600.700.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	130.300.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	28.500.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	101.800.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	470.400.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185.850.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	284.550.000	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	7.810.741.095	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.207.275.500	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	559.825.500	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	559.825.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.500.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	385.500.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.950.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.750.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.200.000	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.737.465.595	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.737.465.595	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.737.465.595	
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	866.000.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	571.000.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	370.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	201.000.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	295.000.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	295.000.000	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Umum	37.923.938.597	
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.923.938.597	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.008.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.008.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.739.383.967	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.739.383.967	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.905.645.120	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.905.645.120	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.238.407.600	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.988.407.600	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.652.365.000	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.365.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.001.104.785	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.001.104.785	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.229.816.895	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.479.816.895	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.735.240.850	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	874.529.750	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	550.000.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	310.711.100	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.276.966.380	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolatan	2.276.966.380	
04.02	SEKRETARIAT DPRD	42.653.913.443	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	42.653.913.443	
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	42.653.913.443	
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.510.475.233	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.080.201	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.080.201	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.495.474.176	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.495.474.176	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.686.562	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.700.000	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.986.562	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.167.006.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.167.006.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167.144.698	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.144.698	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.225.254.353	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.225.254.353	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.614.245	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.217.070	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.391.900	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.005.275	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.747.186.328	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.313.774.636	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	283.411.692	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	5.903.028.670	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	38.496.150	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5.864.532.520	
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.143.438.210	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.318.890.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.396.770.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	922.120.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	956.825.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	956.825.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.310.741.500	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	389.350.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	921.391.500	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.481.186.390	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.945.594.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.485.881.410	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.049.710.480	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.075.795.320	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.075.795.320	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
05.01	PERENCANAAN	10.835.768.792	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.835.768.792	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.835.768.792	
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.686.779.907	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.215.400	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.979.200	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.050.600	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.185.600	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.680.875.000	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.550.950.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	129.925.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.438.767	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	176.934.957	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	158.503.810	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	401.934.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.934.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.023.940	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.023.940	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.971.045	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	656.918.405	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.052.640	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.321.755	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.190	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.321.565	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.263.338.885	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	954.338.885	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	109.009.600	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	149.725.500	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	239.344.350	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	456.259.435	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	309.000.000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	99.000.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	210.000.000	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.885.650.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	542.000.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	115.000.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	400.581.500	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.418.500	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	588.800.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	153.800.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	435.000.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	754.850.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	182.000.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	394.296.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	98.521.000	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	80.033.000	
05.02	KEUANGAN	72.800.953.005	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61.688.581.005	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61.688.581.005	
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.081.379.246	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.032.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.032.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.938.345.046	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.938.345.046	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.077.000	
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.077.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.557.925.200	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.557.925.200	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.000.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.000.000	
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.770.012.719	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	928.400.460	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	104.549.510	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	78.704.510	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	38.786.940	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35.949.600	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	262.262.120	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	210.418.580	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	197.729.200	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	265.243.000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	145.243.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	120.000.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.296.629.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	280.000.000	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	40.000.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	100.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
	Pemerintah Daerah		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	876.629.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.279.740.259	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.279.740.259	
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.837.189.040	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.837.189.040	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	157.740.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.629.449.040	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	11.112.372.000	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	11.112.372.000	
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.009.082.000	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.309.082.000	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.309.082.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.103.290.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.103.290.000	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	4.600.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	560.987.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.000.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	250.000.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	87.298.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	50.000.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	37.200.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	56.716.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	35.070.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	6.419.000	
05.03	KEPEGAWAIAN	8.817.848.375	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.817.848.375	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.817.848.375	
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.109.101.755	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.213.600	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.213.600	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.408.048.155	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.408.048.155	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.840.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.840.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	950.000.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	950.000.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.000.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.708.746.620	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.476.253.060	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.019.913.060	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	53.940.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	402.400.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	468.089.560	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	374.409.560	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	93.680.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	694.904.000	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	409.266.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	285.638.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	69.500.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	69.500.000	
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.426.619.390	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.426.619.390	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.426.619.390	
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.426.619.390	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.308.319.545	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.308.319.545	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.118.299.845	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.118.299.845	
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	870.033.756	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	870.033.756	
5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	870.033.756	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	870.033.756	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	552.300.610	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	428.403.460	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	123.897.150	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	317.733.146	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	317.733.146	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.311.938.000	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	11.311.938.000	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	11.311.938.000	
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.935.922.000	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.105.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.105.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.773.908.000	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.773.908.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	837.706.995	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	625.551.250	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.155.745	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.522.005	
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.301.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.221.005	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.680.000	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.700.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.979.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.001.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.237.019.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	957.688.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51.772.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	459.516.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	24.507.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	402.728.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	19.165.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	279.331.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	279.331.000	
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.138.997.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.623.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.623.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.132.374.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	466.539.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	665.835.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
07.01	KECAMATAN	63.148.633.839	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manguharjo	21.437.290.604	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manguharjo	12.610.571.820	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.536.794.226	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.784.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.784.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.479.554.103	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.477.554.103	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.200.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.715.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.715.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.029.500	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.632.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.397.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.886.720	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.487.886.720	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.624.903	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.559.200	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.765.703	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.300.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.205.440	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	62.205.440	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	62.205.440	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	269.600.360	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	269.600.360	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	269.600.360	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	560.045.300	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	324.385.300	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	324.385.300	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	235.660.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	235.660.000	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	181.926.494	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	181.926.494	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	111.926.494	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Manguharjo	1.009.172.787	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	659.172.787	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	659.172.787	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	659.172.787	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	302.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Sogaten	943.902.300	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	593.902.300	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	593.902.300	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	593.902.300	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.900.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	174.100.000	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Patihan	907.251.628	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	557.251.628	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	557.251.628	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	557.251.628	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	222.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.500.000	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Ngegong	879.846.609	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	529.846.609	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	529.846.609	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	529.846.609	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Winongo	1.014.426.063	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	664.426.063	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	664.426.063	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	664.426.063	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	197.088.320	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	152.911.680	
7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Madiun Lor	997.414.045	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	647.414.045	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	647.414.045	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	647.414.045	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	225.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.400.000	
7.01.0.00.0.00.01.0007	Kelurahan Pangongangan	900.740.057	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	550.740.057	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	550.740.057	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	550.740.057	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	220.385.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129.615.000	
7.01.0.00.0.00.01.0008	Kelurahan Nambangan Lor	1.123.160.291	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	773.160.291	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	773.160.291	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	773.160.291	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	310.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0009	Kelurahan Nambangan Kidul	1.050.805.004	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	700.805.004	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	700.805.004	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	700.805.004	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kartoharjo	20.371.740.946	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kartoharjo	11.584.274.828	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.480.915.838	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.762.400	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.776.800	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.992.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.992.800	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.381.822.530	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.379.822.530	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.000.000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.996.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.996.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	375.341.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.341.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.630.163	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.630.163	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.363.745	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.251.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.152.745	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.960.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.205.440	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	62.205.440	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	62.205.440	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	259.875.650	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	259.875.650	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	259.875.650	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	608.688.850	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	382.507.140	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	382.507.140	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	226.181.710	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	226.181.710	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	172.589.050	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	172.589.050	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	31.446.650	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.872.800	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	84.269.600	
7.01.0.00.0.00.02.0001	Kelurahan Oro-Oro Ombo	920.556.690	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	672.956.040	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	672.956.040	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	672.956.040	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	247.600.650	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	247.600.650	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	217.437.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.163.150	
7.01.0.00.0.00.02.0002	Kelurahan Sukosari	910.181.546	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	560.181.546	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	560.181.546	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	560.181.546	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	316.340.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.660.000	
7.01.0.00.0.00.02.0003	Kelurahan Klegen	1.091.948.355	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	741.948.355	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	741.948.355	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	741.948.355	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	322.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0004	Kelurahan Rejomulyo	1.078.815.767	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	728.815.767	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	728.815.767	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	728.815.767	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0005	Kelurahan Pilangbango	978.459.777	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	628.459.777	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	628.459.777	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	628.459.777	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	316.116.410	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.883.590	
7.01.0.00.0.00.02.0006	Kelurahan Tawangrejo	858.640.051	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	584.340.251	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	584.340.251	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	584.340.251	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	274.299.800	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	274.299.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	219.299.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0007	Kelurahan Kanigoro	1.006.194.395	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	662.294.395	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	662.294.395	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	662.294.395	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	343.900.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	343.900.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	250.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.900.000	
7.01.0.00.0.00.02.0008	Kelurahan Kartoharjo	973.764.935	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	623.772.900	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	623.772.900	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	623.772.900	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	349.992.035	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	349.992.035	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	298.419.280	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51.572.755	
7.01.0.00.0.00.02.0009	Kelurahan Kelun	968.904.602	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	618.904.602	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	618.904.602	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	618.904.602	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	350.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	312.709.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	37.290.500	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Taman	21.339.602.289	
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Taman	12.458.524.277	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.329.439.485	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.787.547	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.787.547	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.850.172.584	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.850.172.584	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.151.972	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.151.972	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.195.184.282	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.096.612.282	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.572.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.195.100	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	357.600	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.837.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.948.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.448.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.500.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.408.827	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	83.408.827	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	83.408.827	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	291.351.905	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	291.351.905	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	291.351.905	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	597.606.270	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	437.352.670	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	437.352.670	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	160.253.600	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	160.253.600	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	156.717.790	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	156.717.790	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	91.906.300	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.272.000	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	36.539.490	
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Mojorejo	1.002.591.085	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	724.653.550	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	724.653.550	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
	Kecamatan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	724.653.550	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	277.937.535	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	277.937.535	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	205.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.937.535	
7.01.0.00.0.00.03.0002	Kelurahan Pandean	1.289.044.130	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	699.676.380	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	699.676.380	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	699.676.380	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	589.367.750	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	589.367.750	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	515.764.750	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73.603.000	
7.01.0.00.0.00.03.0003	Kelurahan Banjarejo	908.000.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	658.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	658.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	658.000.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	250.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	250.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0004	Kelurahan Kuncen	709.236.197	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	436.111.197	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	436.111.197	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	436.111.197	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	273.125.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	273.125.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.125.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0005	Kelurahan Manisrejo	1.041.742.260	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	766.742.260	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	766.742.260	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	766.742.260	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0006	Kelurahan Kejuron	953.554.140	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	685.722.740	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	685.722.740	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	685.722.740	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	267.831.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	267.831.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	67.831.400	
7.01.0.00.0.00.03.0007	Kelurahan Josenan	898.675.100	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	623.675.100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	623.675.100	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	623.675.100	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	275.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0008	Kelurahan Demangan	936.735.100	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	623.675.100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	623.675.100	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	623.675.100	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	313.060.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	313.060.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	238.060.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0009	Kelurahan Taman	1.141.500.000	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	710.000.000	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	710.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	710.000.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	431.500.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	431.500.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	356.500.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.347.363.564	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.347.363.564	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.347.363.564	
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.852.158.697	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.750.000	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.750.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.987.145.114	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.145.114	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	762.263.583	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	712.263.583	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.000.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	344.302.347	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	344.302.347	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	344.302.347	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	871.058.100	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	871.058.100	

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1	2	3	4
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	725.062.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	145.996.100	
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	222.985.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	222.985.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	222.985.000	
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	553.661.370	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	553.661.370	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	493.661.370	
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.503.198.050	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.503.198.050	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.503.198.050	

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 klasifikasi belanja daerah terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga dan
- d. Belanja Transfer

Belanja operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset alinnya yang memberi manfaat lebih dari satu (1) periode akuntansi. Belanja Tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa.

Pada tahun 2022 plafon anggaran sementara berdasarkan klasifikasi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	PALFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	485.258.678.433,00
2	Belanja Barang dan Jasa	436.594.527.461,00
3	Belanja Bunga	0
4	Belanja Subsidi	0
5	Belanja Hibah	13.572.686.278,00
6	Belanja Bantuan Sosial	23.898.834.000,00
7	Belanja Modal	165.395.287.479,00
	a.Belanja Modal Tanah	0,00
	b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.304.237.988,00
	c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.281.239.379,00
	d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.695.457.752,00
	e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.114.352.360,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0
8	Belanja Tidak Terduga	5.279.740.259,00
9	Belanja Bagi Hasil	0
10	Belanja Bantuan Keuangan	0
	TOTAL	1.129.999.753.910,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (3), Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jumlah Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 125.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit antara belanja dengan pendapatan. Jumlah tersebut dirinci dalam plafon anggaran pembiayaan Tahun anggaran 2022 yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	125.000.000.000,00
3.1.1	Penggunaan SiLPA	125.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
3.3	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	125.000.000.000,00
	Sisa Lebih / Kurang Anggaran (SiLPA) Berjalan	0,00

Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021

Penerimaan pembiayaan Kota Madiun tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 125.000.000.000,00 yang diharapkan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran APBD tahun 2021 yang tidak bisa direalisasikan maupun pelampauan pendapatan. Sementara proyeksi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00.

Sehingga jumlah pembiayaan netto diperoleh sebesar Rp. 125.000.000.000,00.
Sedangkan SiLPA yang diperoleh pada tahun 2022 Rp. 0,00.

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 memuat plafon sementara program, kegiatan dan sub kegiatan. Apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :

1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2021 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yg bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan

menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke belanja operasi pada Perangkat Daerah berkenaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada PPAS dan RKA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah disusun dan disepakati bersama guna dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.

Madiun, Juli 2020

WALIKOTA MADIUN

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA